Kecamatan Candi
Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2021

RANCANGAN AKHIR

Rencana Strategi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas hidayah-Nya dokumen "**Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026"** telah kami susun sebagai arah dan pedoman bagi DLHK untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Candi ini merupakan implementasi berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Desain program, kegiatan dan sub kegiatan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan Kepmendagri Nomor 050/3708 Tahun 2020.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan (data dan informasi) dalam penyelesaian dokumen RENSTRA ini. Akhir kata semoga dokumen RENSTRA Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini dapat memberikan informasi kepada stakeholders dan pihak-pihak terkait.

Sidoarjo, 2021
CAMAT CANDI
KABUPATEN SIDOARJO

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.1.1 Pengertian Renstra I-1
1.1.2 Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah I-2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra OPD I-2
1.1.4 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (Renja OPD) I-4
1.2 Landasan Hukum I-6
1.3 Maksud Dan Tujuan I-8
1.4 Sistematika Penulisan I-9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Candi..... II-1
2.2 Sumber Daya Kecamatan Candi II-4
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.... II-14
2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Candi II-14
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo II-17

BAB III ISU-ISU STRATEGIS III-1
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Candi III-1
3.2 Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil

Kepala Daerah Terpilih III-6
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Provinsi Jawa Timur III-11
3.4 Telaahan Rancangan Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis..... III-13
3.5 Penentu Isu-Isu Strategis III-15

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN..... IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1
5.1 Strategi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo V-1
5.2 Arah Kebijakan Kecamatan Candi sebagai Desa Maju..... V-12

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN VI-1
6.1 Rencana Program VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-1
7.1 Indikator Kinerja Penyelenggaraan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ... VII-1

BAB VIII PENUTUP..... VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia II-9
Tabel 2.2 Berdasarkan Tingkat Pendidikan II-10
Tabel 2.3 Sumber Daya Berdasarkan Golongan..... II-10
Tabel 2.4 Sarana dan Prasarana Kecamatan Candi II-11
Tabel 2.5 Hasil Kinerja Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Periode 2017-2020 ..... II-16
Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo III-2
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah..... III-10
Tabel 3.3 Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024..... III-11
Tabel 3.4 Telaah Renstra Kementerian..... III-12
Tabel 3.5 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo III-14
Tabel 3.6 Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis III-15
Tabel 3.7 Total Skor Isu-Isu Strategis..... III-16
Tabel 3.8 Rincian kewenangan Bupati yang Dilimpahkan Kepada Camat III-18
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target IV-3
Tabel 5.1 Analisis Faktor Internal Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ... V-2
Tabel 5.2 Analisis Faktor Eksternal Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo.. V-3
Tabel 5.3 Analisis SWOT V-4
Tabel 5.4 IFE dan EFE Matrix..... V-8
Tabel 5.5 Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan V-13
Tabel 5.6 Keterkaitan Tujuan, Sasaran OPD V-14
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Candi Tahun 2021-2026 ..... VI-3
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada Sasaran RPJMD..... VII-2
Tabel 7.2 Formulasi Perhitungan IKU Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo VII-3

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Arsitektur Kinerja Pembangunan I-3
Gambar 1.2 Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD..... I-4
Gambar 1.3 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah I-6
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Candi..... II-2
Gambar 2.2 Persentase ASN dan Non ASN berdasarkan Tingkat Pendidikan II-10
Gambar 2.3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... II-11
Gambar 5.1 Diagram SWOT V-10

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.1.1 Pengertian Renstra

Perencanaan strategis merupakan salah satu metode yang digunakan di dalam perencanaan pembangunan. Pada perencanaan strategis dijadikan alat yang dapat digunakan oleh organisasi pemerintah dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi pada organisasi pemerintah itu sendiri maupun dari luar pemerintahan. Implementasi perencanaan strategis dalam perencanaan pembangunan di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Secara spesifik perencanaan strategis diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam pasal 1 ayat 29 Permendagri 86 tahun 2017 Rencana Strategis perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dalam pasal 13 juga dijelaskan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

1.1.2 Fungsi Renstra OPD dalam Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong adanya proses pembangunan secara terpadu efisien, perencanaan pembangunan mempunyai 5 (lima) tujuan dan fungsi pokok yakni:

a. Mendukung koordinasi antara pelaku pembangunan
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, waktu dan fungsi pemerintah, baik pusat maupun daerah.
c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran pelaksanaan dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan.
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif dan adil

Dengan demikian fungsi Renstra OPD adalah sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dengan sasaran pencapaian yang jelas dan terukur.

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra OPD

Berangkat pada amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, maka Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Sidoarjo yang memiliki kewajiban untuk menyusun dokumen Rencana Strategis Kecamatan Candi Tahun 2021-2026. Dokumen ini merupakan sebagai alat perencanaan yang disajikan sebagai pedoman pencapaian visi pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026. Penyusunan dokumen ini secara teknis merujuk pada arsitektur kinerja pembangunan yang secara umum terdiri dari dua rangkaian proses yaitu pada proses teknokratis dan proses politis. Rangkaian proses tersebut ditunjukkan pada gambar 1.1, penyusunan Renstra dilakukan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMD.

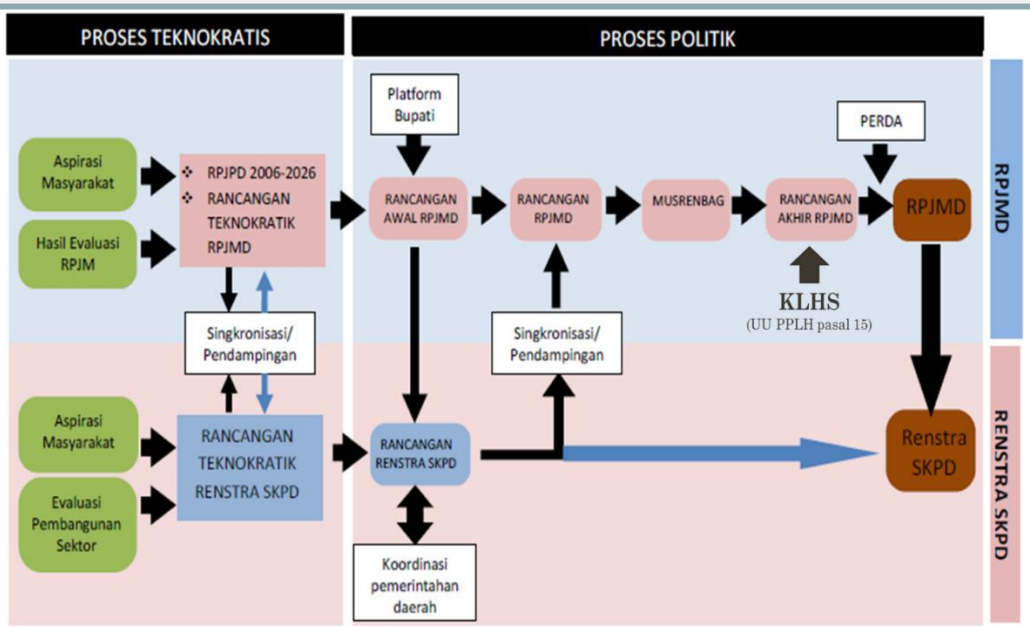

Gambar 1.1
Arsitektur Kinerja Pembangunan

Rancangan awal Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo disusun berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sidoarjo yang juga disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kecamatan Candi. Proses politik selanjutnya adalah sinkronisasi dan pendampingan rancangan Renstra Kecamatan Candi untuk melengkapi Rancangan RPJMD. Musrenbang RPJMD dilaksanakan untuk menghasilkan rancangan akhir RPJMD. Rancangan akhir RPJMD ini dibahas bersama antara pemerintah Kabupaten dengan DPRD dalam forum rapat pleno DPRD tentang penetapan RPJMD untuk dijadikan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Perda dimaksud akan dijadikan rujukan hukum untuk menetapkan Rancangan Renstra Kecamatan Candi menjadi Renstra Kecamatan Candi. Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan oleh Camat harus sinkron dengan Perda RPJMD Kabupaten Sidoarjo. Penyusunan rancangan Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo secara terperinci merujuk pada prosedur yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagaimana ditunjukkan pada gambar 1.2 berikut ini.

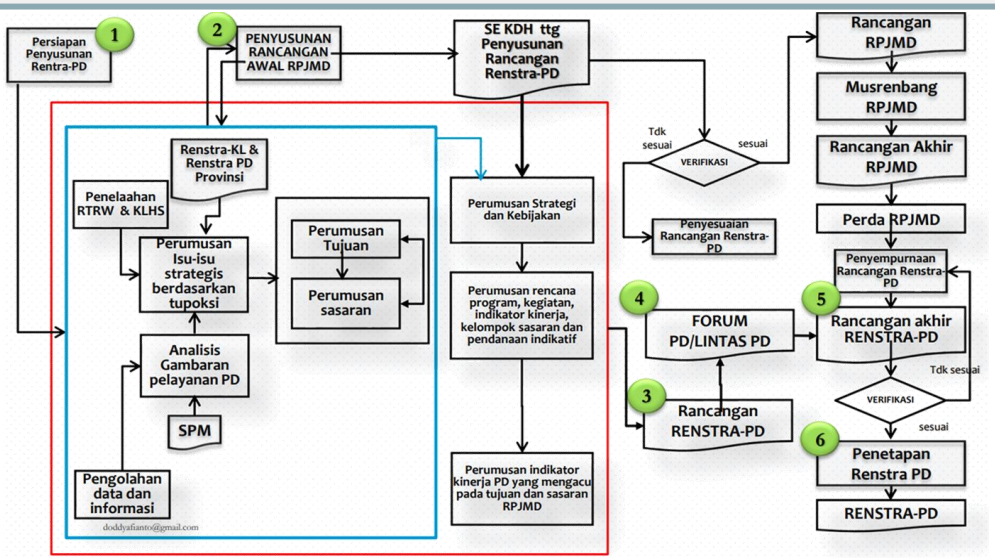

Gambar 1.2
Bagan Alur Penyusunan Rancangan Renstra SKPD

Rancangan Awal Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo antara lain memuat analisis gambaran pelayanan perangkat daerah pada periode sebelumnya, isu-isu strategis Kecamatan Candi berdasarkan tupoksi, hasil penelaahan terhadap Renstra K/L dan dan Renstra Provinsi dimana Renstra K/L dan Renstra Provinsi yang ditelaah adalah Renstra Kementerian Dalam Negeri tahun 2019-2024. Rencana Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

1.1.4 Keterkaitan Renstra OPD dengan RPJMD, Renstra Kementerian/Lembaga (K/L), Renstra Kabupaten dan Rencana Kerja (RENJA) OPD

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 272 ayat (1), yang berbunyi: Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional. Pasal 273 ayat (1) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 272 ayat (1) ditetapkan dengan Perkada setelah RPJMD ditetapkan. (2) Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan ke dalam rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sedangkan Rencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-OPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode (satu) tahun. Dengan demikian maka hubungan Renstra OPD dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat.

Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo juga merupakan bagian dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu Renstra ini memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan yang lain, baik pada level yang lebih tinggi atau ruang lingkup yang lebih luas, maupun pada level dan ruang lingkup yang lebih rendah dan lebih kecil. Gambar 1.3 berikut ini menjelaskan tentang keterkaitan antara Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.

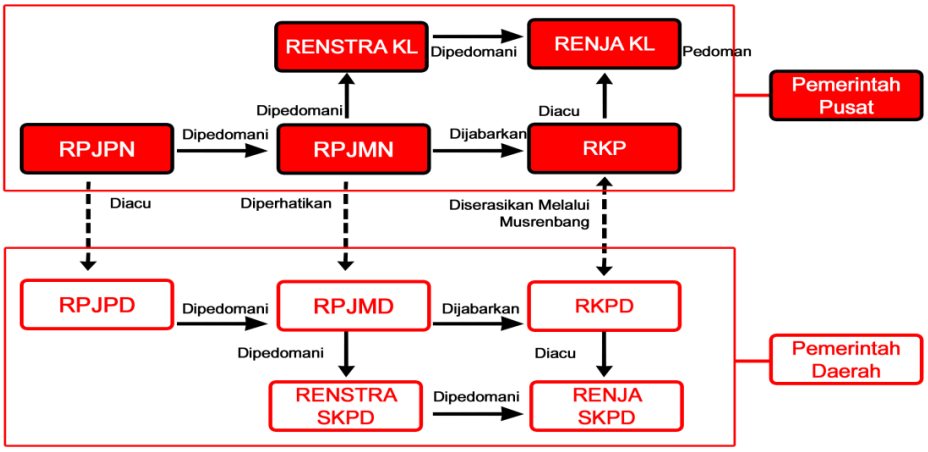

Gambar 1.3
Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah

Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo menurut gambar di atas dipedomani oleh RPJMD Kabupaten Sidoarjo dan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo setiap tahunnya dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026. Kesatuan berbagai dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo dimaksudkan untuk menjamin adanya kesatuan arah pembangunan, untuk mencapai visi pembangunan yang terukur kinerja pembangunannya; baik kinerja input yang terlihat pada besaran sumber daya yang digunakan untuk pembangunan, kinerja output yang dilihat dari apa yang dikerjakan dan dihasilkan suatu kegiatan, kinerja outcome yang teridentifikasi dari apa yang dicapai dari suatu program dan akhirnya kinerja impact yang tergambar oleh adanya perubahan sebagaimana tertuang dalam visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Dalam konteks praktis maka Kecamatan Candi dalam melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan, artinya Rencana Strategisnya berpedoman pada misi pertama RPJMD Kabupaten Sidoarjo.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dilandasi oleh berbagai peraturan hukum sebagaimana disebutkan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang -Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
14. Keputusan Menteri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015;
16. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 7 tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Jawa Timur 2019-2024;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
18. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta tata kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo
19. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo;
20. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
21. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Candi Tahun 2021-2026 adalah memberikan gambaran strategis tentang arah program kerja, rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang bersifat indikatif dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun tujuan penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

a. Memberikan arah pembangunan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) tahun kedepan;
b. Membantu dalam mencapai tujuan dan sasaran Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
c. Membantu dalam sinkronikasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan, strategi, kebijakan dan capaian program RPJMD;
d. Sebagai dasar/pijakan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan yakni Renja/RKT, RKA dan DPA-OPD Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar pada sistematika penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
2.2 Sumber daya
2.3 Kinerja Pelayanan
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Candi
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.3 Telaahan Renstra Kementerian
3.4 Penentuan isu-isu strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Candi
4.2 Hubungan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Candi dengan Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
KECAMATAN CANDI

2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN CANDI

Berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Dipimpin oleh seorang Camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo mempunyai fungsi:

a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
e. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
g. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
h. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
i. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;

j. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;

k. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo;

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya

Untuk dapat menjalankan fungsi yang telah ditetapkan, Kecamatan Candi memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

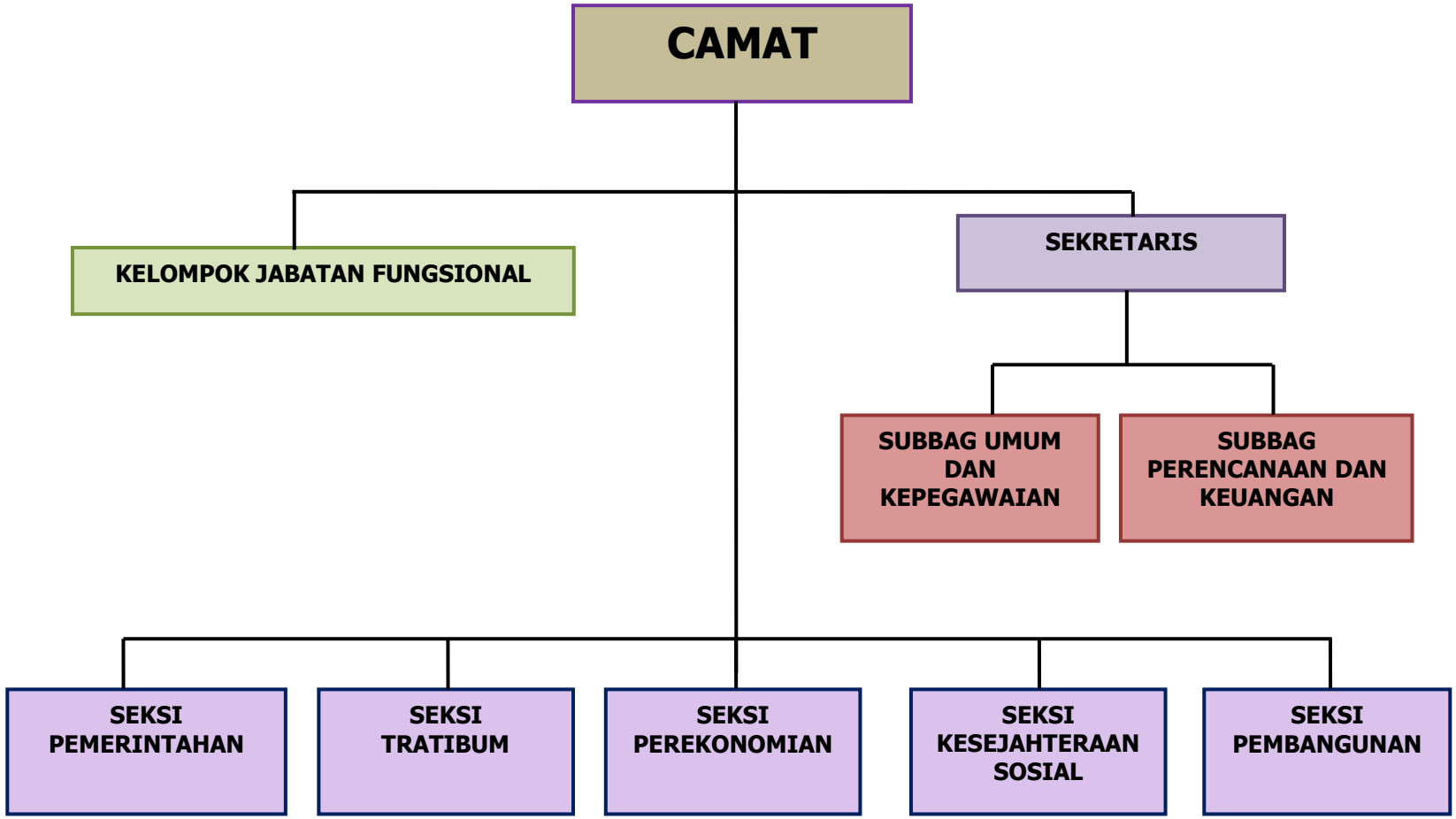

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Kecamatan Candi

2.2 SUMBER DAYA KECAMATAN CANDI

Uraian tugas sesuai dengan struktur Organisasi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

1. **Camat**

   Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Camat berwenang menandatangani:

   a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
   b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
   c. Legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
   d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
   e. Rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
   f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
   g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
   h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro

2. **Sekretariat Kecamatan**

   Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Sekretariat Kecamatan mempunyai fungsi:

   a. penyusunan rencana program, pengumpulan dan pengelolaan data serta pelaporan;
   b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi- seksi;
   c. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan keprotokolan;
   d. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
   e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

   Sekretariat terdiri dari 2(dua) sub bagian yaitu:

   1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

      Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
b. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor;
c. menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
d. menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat;
e. melaksanakan administrasi kepegawaian;
f. melaksanakan pembinaan kepegawaian;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:

a. menyiapkan penyusunan perencanaan program;
b. mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai;
c. menyiapkan rencana kebutuhan anggaran;
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai dengan tugasnya.

3. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pemerintahan;
b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pemerintahan, meliputi:
   1. pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa;
   2. evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa, pungutan, tata ruang dan organisasi pemerintah desa;

3. pengambilan sumpah dan janji anggota badan permusyawaratan desa;

c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pemerintahan;
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum;
b. pelaksanaan teknis kegiatan ketenteraman dan ketertiban umum, antara lain:
   1. pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum;
   2. penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
   3. pengawasan dan penertiban usaha (bangunan/ reklame liar);
   4. penanganan konflik sosial;
c. memproses permohonan Izin Gangguan usaha mikro;
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

5. Seksi Perekonomian

Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang

perekonomian. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Perekonomian mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan bidang perekonomian;
b. pelaksanaan teknis kegiatan di bidang perekonomian, meliputi:
    1. pembinaan usaha ekonomi masyarakat;
    2. pembinaan Pedagang Kaki Lima.
c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
    1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
    2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang perekonomian;
e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang perekonomian;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Sosial mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang urusan kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, meliputi:
    1. pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan;
    2. pembinaan kegiatan sosial, agama dan kemasyarakatan.
c. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;
d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan;

e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

7. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud bahwa Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan di bidang pembangunan dan lingkungan;
b. pelaksanaan teknis kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan, meliputi:
   1. pembinaan penanganan sampah domestik;
   2. pembinaan lembaga dan kegiatan pemeliharaan lingkungan hidup.
c. pemrosesan permohonan perizinan, meliputi:
   1. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) usaha mikro;
   2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luasan bangunan 400 m^2 (empat ratus meter persegi).
d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dalam kegiatan bidang pembangunan dan lingkungan;
e. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pembangunan dan serta lingkungan;
f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugasnya.

Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh berbagai sumber daya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana. Berikut ini akan disampaikan uraian terkait sumber daya - sumber daya sebagai Input dalam pelaksanaan tugasnya.

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

   Sumber Daya Manusia merupakan modal penting yang menentukan perkembangan organisasi kearah yang lebih baik. Pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) atau aparatur di lingkungan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu faktor kunci bagi keberhasilan organisasi dalam upaya membangun sistem transportasi yang handal.

Peningkatan kompetensi dan profesionalitas setiap aparatur harus terus menerus dilakukan evaluasi untuk selanjutnya dilakukan peningkatan melalui berbagai kegiatan peningkatan SDM baik melalui penyegaran maupun mekanisme pendidikan dan latihan yang ada. Jumlah ASN atau PNS di Kabupaten Candi adalah sebanyak 26 orang sedangkan Non ASN/ Non PNS sebanyak 14 orang dengan total 40 orang.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai berdasarkan Usia

Usia	ASN	NON ASN	ASN+Non ASN
	Jumlah	Jumlah	Jumlah
21-30	0	4	4
31-40	5	5	10
41-50	7	4	11
51-58	14	1	15
TOTAL	26	14	40

Sumber: Kecamatan Candi, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa Jumlah pegawai ASN dan Non ASN yang berusia 21-30 tahun sebanyak 4 orang, sedangkan jumlah pegawai yang berusia 31-40 tahun sebanyak 10 orang. Pegawai yang berusia antara 41-50 tahun sebanyak 11 orang dan pegawai yang berusia 51-58 tahun sebanyak 15 oarang. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah pegawai ASN dan Non ASN yang paling banyak berada di Kecamatan Candi berusia 51-58 tahun sedangkan jumlah pegawai baik ASN maupun Non ASN yang paling sedikit adalah berusia 21-30 . Berdasarkan data tersebut, maka Kecamatan Candi perlu mempersiapkan pegawai baru yang berusia produktif serta tenaga ahli dalam pelayanan kepada masyarakat agar meningkatnya kinerja serta realisasi target kinerja yang telah ditetapkan. Persentase ASN dan Non ASN di Kecamatan Candi dapat dilihat pada Gambar 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	ASN		NON ASN		ASN+Non ASN	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
S2	-	-	-	-	0	0%
S1	10	38%	-	-	10	25%
D3	1	4%	-	-	1	3%
SMA	15	58%	13	93%	28	70%
SMP	-	-	1	7%	1	3%
SD	-	-	-	-	0	0%
TOTAL	26	100%	14	100%	40	100%

Sumber: Kecamatan Candi, 2021

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas bahwa jumlah ASN dan Non ASN dengan tingkat pendidikan SMP sebanyak 1 orang, sementara yang berpendidikan SMA sebanyak 28 orang, D3 ada 1 orang, sedangkan yang berpendidikan S1 sebanyak 10 orang. Maka ASN dan Non ASN di Kecamatan Candi paling banyak yakni menempuh pendidikan SMA dengan persentase 70%. Persentase ASN dan Non ASN berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Gambar 2.2. Jenjang pendidikan yang ditempuh para pegawai akan mempengaruhi pangkat atau golongan. Golongan pegawai di Kecamatan Candi dapat dilihat pada Tabel 2.3.

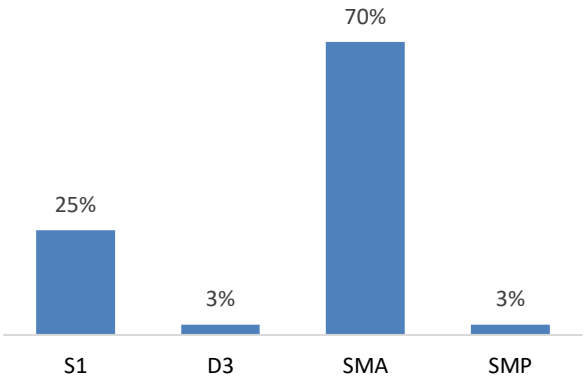

Gambar 2.2
Persentase ASN dan Non ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3
Sumber Daya Berdasarkan Golongan

Eselon	Total
III.a	1
III.b	1

IV.a	3
Fungsional Umum	1
Golongan	
IV/b	1
IV/a	2
III/d	2
III/c	5
III/b	5
III/a	3
II/d	10
II/c	2
II/b	1
II/a	-
TOTAL	32

2. Ketersediaan Sarana dan Prasarana

   Sarana dan Prasarana pendukung kelancaran tugas dan fungsi dari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo antara lain:

Tabel 2.4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Candi

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Barang Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
1	Tanah Kecamatan Candi	8.519	m2	1974	Baik
2	Isizu Panter	1	Unit	1997	Baik
3	Daihatsu Terios TS plus	1	Unit	2007	Baik
4	Isuzu/Ter54 Turbo	1	Unit	2014	Baik
5	Toyota Rush	1	Unit	2014	Baik
6	Suzuki 125cc	1	Unit	2007	Baik
7	Honda GL 160D Mega Pro	2	Unit	2010	Baik
8	Honda Vario 125 cc	6	Unit	2014	Baik
9	Honda Vario 125 cc	1	Unit	2015	Baik
10	Honda Vario 108 cc	1	Unit	2015	Baik
11	Pompa air sanyo	1	Unit	2014	Baik
12	Pompa air wasser	1	Unit	2016	Baik
13	Meteran Jalan Tososhi W/Roda	1	Unit	2016	Baik
14	Korden	1	Buah	2011	Baik
15	Korden	1	Buah	2014	Baik
16	Korden	1	Buah	2015	Baik
17	Korden	1	Unit	2016	Baik
18	Mesin antrian Asus	1	Unit	2015	Baik
19	Mesin absensi	1	Unit	2014	Rusak
20	Finger print absensi	2	Unit	2016	Baik
21	Mesin vacum cleaner	1	Unit	2016	Baik

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Barang Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
22	Mesin pemotong rumput	1	Unit	2014	Rusak
23	Mesin pemotong rumput	1	Unit	2016	Baik
24	Mesin penghancur kertas	1	Unit	2009	Rusak
25	Mesin penghancur kertas	1	Unit	2016	Baik
26	Telepon Panasonic	1	Unit	2008	Baik
27	Telepon Panasonic	1	Unit	2015	Baik
28	Faximile	1	Unit	2008	Rusak
29	Faximile	1	Unit	2013	Baik
30	Scanner (signature Pad)	1	Unit	2012	Baik
31	Scanner (Iris Scanner)	1	Unit	2012	Baik
32	Scanner (Finger)	1	Unit	2012	Baik
33	Scanner	1	Unit	2014	Baik
34	Scanner (signature Pad)	1	Unit	2016	Baik
35	Scanner (Iris Scanner)	1	Unit	2016	Baik
36	Scanner (Finger)	1	Unit	2016	Baik
37	Smart Card Reader E-KTP	1	Unit	2016	Baik
38	kamera Digital	1	Unit	2010	Baik
39	Kamera Canon	1	Unit	2012	Baik
40	Kamera Nikon	1	Unit	2013	Baik
41	Kamera Canon	1	Unit	2015	Baik
42	Kamera Canon	1	Unit	2016	Baik
43	Handycam	1	Unit	2012	Baik
44	Handycam	1	Unit	2016	Baik
45	Komputer PC	3	Unit	2008	Baik
46	Komputer PC	2	Unit	2009	Baik
47	Komputer PC	4	Unit	2011	Baik
48	Komputer PC	4	Unit	2012	Baik
49	Komputer PC	1	Unit	2013	Baik
50	Komputer PC	4	Unit	2014	Baik
51	Komputer PC	5	Unit	2015	Baik
52	Komputer PC	2	Unit	2016	Baik
53	Notebook	1	Unit	2010	Baik
54	Notebook Asus	2	Unit	2015	Baik
55	Laptop	1	Unit	2011	Baik
56	Laptop Hp	1	Unit	2013	Baik
57	Laptop Asus	1	Unit	2016	Baik
58	Laptop Dell	4	Unit	2016	Baik
59	Printer	3	Unit	2009	Baik
60	Printer	5	Unit	2011	Baik
61	Printer	7	Unit	2012	Baik
62	Printer	1	Unit	2013	Baik
63	Printer	2	Unit	2014	Baik

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Barang Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
64	Printer	7	Unit	2015	Baik
65	Printer	1	Unit	2016	Baik
66	Proyektor	1	Unit	2010	Baik
67	Proyektor	1	Unit	2015	Baik
68	UPS Stabilizer	1	Unit	2014	Baik
69	UPS Stabilizer	5	Unit	2015	Baik
70	UPS Stabilizer	3	Unit	2016	Baik
71	Sound system	1	Unit	2011	Baik
72	Sound system	1	Unit	2014	Baik
73	Sound system	1	Unit	2015	Baik
74	Sound system	1	Unit	2016	Baik
75	DVD Player	1	Unit	2016	Baik
76	Conference Microphone	1	Unit	2016	Baik
77	Wireless Microphone	3	Unit	2016	Baik
78	Tiang Mic	2	Unit	2016	Baik
79	Peralatan dan jaringan	1	Unit	2016	Baik
80	AC	1	Unit	2008	Rusak
81	AC	1	Unit	2009	Rusak
82	AC	1	Unit	2010	Rusak
83	AC	2	Unit	2011	Rusak
84	AC	2	Unit	2012	Baik
85	AC	2	Unit	2013	Baik
86	AC	1	Unit	2014	Baik
87	AC	7	Unit	2015	Baik
88	AC	2	Unit	2016	Baik
89	TV	2	Unit	2012	Baik
90	TV	1	Unit	2014	Baik
91	TV	2	Unit	2015	Baik
92	TV	2	Unit	2016	Baik
93	Neon Box	1	Unit	2016	Baik
94	Podium	1	Buah	2016	Baik
95	Meja kursi tamu	1	Set	2011	Baik
96	Meja pelayanan	1	Set	2013	Baik
97	Meja Tamu	2	Set	2014	Baik
98	Kursi Kerja	6	Buah	2009	Baik
99	Kursi Kerja	3	Buah	2010	Baik
100	Kursi Kerja	2	Buah	2011	Baik
101	Kursi Kerja	10	Buah	2012	Baik
102	Kursi Kerja	10	Buah	2013	Baik
103	Kursi kerja Eselon	3	Buah	2015	Baik
104	Kursi rapat	60	Buah	2012	Baik
105	Kursi rapat	80	Buah	2013	Baik
106	Kursi rapat	50	Buah	2014	Baik

No	Nama/ Jenis Barang	Jumlah	Barang Satuan	Tahun Perolehan	Kondisi
107	Kursi Rapat VIP	15	Buah	2016	Baik
108	Kursi Tunggu	3	Buah	2010	Baik
109	Kursi Tunggu	4	Buah	2010	Baik
110	Kursi Tunggu	4	Buah	2014	Baik
111	Meja Kerja	3	Buah	2010	Baik
112	Meja Kerja	10	Buah	2014	Baik
113	Meja Kerja Eselon	2	Buah	2014	Baik
114	Meja Kerja Eselon	3	Buah	2015	Baik
115	Meja Rapat	6	Buah	2012	Baik
116	Meja Rapat	10	Buah	2015	Baik
117	Meja Komputer	1	Buah	2013	Baik
118	Meja Komputer	1	Buah	2014	Baik
119	Filling Cabinet	2	Buah	2015	Baik
120	Filling Cabinet	1	Buah	2016	Baik
121	Almari Arsip	1	Set	2013	Baik
122	Almari Arsip	4	Set	2015	Baik
123	Almari Arsip	1	Set	2016	Baik
124	Spring Bed	1	Set	2015	Baik
125	Alfabert Papan Ruang	1	Paket	2016	Baik
126	Gazebo	1	Paket	2015	Baik
127	Lampu hias taman	1	Paket	2014	Baik
128	Plusutan	1	Paket	2014	Baik
129	Ayunan	1	Paket	2014	Baik
130	Tambah Daya	1	Paket	2014	Baik

2.3 KINERJA PELAYANAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

2.3.1 Kinerja Pelayanan Kecamatan Candi

Kecamatan Candi sebagai unsur pelaksana penunjang urusan pemerintahan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan. Kinerja Kecamatan Candi diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja diantaranya Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang didelegasikan ke Kecamatan Candi dilaksanakan denan baik, Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi. Dalam pelaksanaannya, kinerja Kecamatan Candi telah memuaskan. Dilihat dari pencapaian realisasi kinerja yang telah melampaui target yang ditetapkan. Meskipun secara pencapaian,

kinerja Kecamatan Candi telah tercapai, namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan berbagai macam kendala pelaksanaan. Permasalahan pertama terkait dengan SDM yang masih saja memiliki permasalahan dalam pelayanan di sistem aplikasi serta belum mengertinya tentang pelaksanaan indikator yang akan menjadi tolak ukur pada suatu target program, kegiatan maupun sub kegiatan.

Tabel 2.5

Hasil Kinerja Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Periode 2017-2020

No	Indikator Kinerja Kecamatan Candi	Target Renstra OPD pada tahun				Realisasi Capaian pada tahun				Rasio Capaian pada tahun-			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	79	80	83	84	80	80	86,954	89.443	100	100	105	107
2	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Candi Dilaksanakan Dengan Baik	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%	N/A	N/A	100%	100%
3	Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	5%	5%	5%	10%	5%	5%	42%	110%	100%	100%	840%	110

Berikut merupakan penjabaran kinerja dari masing-masing indikator:

1. **Nilai Survey Kepuasan Masyarakat**

   Nilai SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan pada tahun 2020 sebesar 107% atau termasuk dalam kategori sangat berhasil. Jika dibandingkan dengan nilai SKM tahun 2017, 2018, dan 2019, nilai ini mengalami kenaikan.

2. **Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Candi Dilaksanakan Dengan Baik**

   Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yan di delegasikan ke Kecamatan Candi bahwa dalam kategori berhasil. Hal ini ditandai dengan realisasi telah mencapai 100% pada tahun 2019 dan 2020. Namun pada tahun 2017 dan 2018 tidak dapat diukur. Hal ini sebagai pembelajaran untuk selanjutnya adanya pengukuran yang akurat agar dapat mengetahui antara target dan realisasi setiap tahunnya mengalami kenaikkan atau tidak, karena akan berpengaruh pada capaian kinerja untuk Kecamatan Candi.

3. **Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi**

   Pada Tahun 2020 capaian rasio kinerja terletak lebih dari 100% hal ini pada kategori sangat baik. Tetapi masih kurangnya respon dan atusias dari perangkat desa untuk mengisi data terkait IDM, kurangnya pembinaan secara intensif terhadap aparatur desa terkait pengisian data IDM, kurangnya koordinas secara intensif dengan dinas terkait dan perangkat desa terkait pengisian data IDM dan evaluasi secara berkala.

2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Adapun tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Kecamatan Candi adalah sebagai berikut:

Peluang:

a) perkembangan teknologi informasi yang dapat menunjang kinerja pelayanan maupun administratif.

b) Adanya kebijakan-kebijakan baru terkait perizinan usaha yang memudahkan kepengurusan izin dan pengawasan.
c) Kepedulian desa akan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan telah cukup baik.
d) Meningkatkan potensi desa untuk meningkatkan jumlah desa maju dan desa mandiri di Kecamatan Candi

Tantangan:

a) Perlunya Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang IT dalam menunjang tugas pokok fungsi yang sesuai kualifikasi tenaga ahli dalam IT
b) Penambahan anggaran dalam Sarana dan prasarana yang dapat menunjang kinerja dan pelayanan
c) Adanya stigma desa terhadap indeks desa membangun. Jika semakin tinggi kategori desa, semakin berkurang ADD. Sehingga banyak desa yang tidak mau naik kelas.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI KECAMATAN CANDI

Pada identifikasi permasalahan yang berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Kecamatan Candi yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Terdapat pada Tabel 3.1 yaitu ada 6 (enam) kolom. Kolom pertama yang berisikan tentang aspek kajian yaitu pada aspek-aspek kajian yang telah dilakukan oleh OPD. Kolom kedua berisikan tentang capaian kinerja OPD. Data capaian kinerja ini bersumber dari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Kolom keempat dan kelima berisikan tentang faktor-faktor yang dapat dikendalikan dalam kewenangan OPD dan diluar kewenangan OPD.

Dalam mengidentifikasi permasalahan juga melakukan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi dengan adanya tujuan untuk mencapai target kinerja. Faktor-faktor ini dibedakan menjadi faktor internal dan faktor eksternal. Permasalahan yang muncul pada Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo antara lain:

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM), meliputi sebagai berikut: a. Pelayanan yang prima, efektif dan efisien b. Kemudahan dalam prosedur pelayanan baik persayaratan teknis maupun administratif c. Persyaratan pelayanan yang memudahkan dalam pelayanan kepada publik d. SDM yang ada pada pelayanan publik e. Kedisiplinan SDM pelayanan f. Akuntabilitas yang ada pada petugas pelayanan g. Keahlian petugas pelayanan h. Ketepatan waktu dalam pelayanan i. Keadilan yang dilakukan pada saat pelayanan j. Sikap yang sopan, ramah yang dilkukan petugas pelayanan k. Keterjangkauan biaya yang dilakukan l. Kesesuaian pembukaan jam pada loket pelayanan	100%	a. Penambahan dan pemeliharaan sarana dan prasarana b. peningkatan keahlian SDM pelayanan agar tercapaian capaian kinerja yang optimal c. melakukan pelayanan sesuai dengan SOP dan SPP pelayanan efektif, efisien, responsif, akuntabilitas dalam pelayanan publik d. penerapan pelayanan berbasis sistem IT	a. Pemahaman masyarakat terhadap persyaratan dan prosedur pelayanan b. dukungan serta tidak lanjut dari OPD terkait masalah kependudukan c. kedisiplinan yang dilakukan untuk penyusunan dokumen desa	1. kurangnya perlengkapan penunjang teknis berbasis teknologi dalam melakukan pelayanan 2. belum optimalnya sistem administrasi perkantoran baik ditingkat kecamatan maupun desa 3. belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penunjang kinerja pelayanan

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
m. Kenyamanan lingkungan sekitar n. Kemanan yang didapatkan publik pada saat melakukan pelayanan o. Ketepatan janji dalam penyelesaian pelayanan p. Penunjang sarana dan prasarana pelayanan				
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan ke Kecamatan Candi Dilaksanakan Dengan Baik, Meliputi sebagai berikut: a. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa b. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang c. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Perhubungan e. Tenaga Kerja f. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak g. Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana h. Perindustrian i. Perdagangan	100%	a. Peningkatan pembinaan dan koordinasi untuk urusan pemerintahan umum agar terlaksananya kinerja pada Kecamatan dan Desa b. Peningkatan Sosialisasi dalam pelaporan kinerja meliputi aspek penganggaran, pertanggungjawaban, dll yang dilakukan oleh Kecamatan kepada desa	a. Peran serta keikut sertaan masyarakat dalam dukungan urusan pemerintahan umum b. Koordinasi yang baik antara kecamatan dan desa	1. Belum matangnya perencanaan kinerja secara teknis pada kegiatan kecamatan dan desa 2. Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing OPD 3. Belum memahami sepenuhnya tentang perencanaan dalam indikator pada rencana strategis sebagai ajuan kinerja setiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan terlaksana

Aspek Kajian	Capaian/ Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
j. Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat k. Lingkungan Hidup l. Perumahan dan Kawasan Permukiman m. Sosial				
Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	100%	a. Kurangnya pembinaan kepada masing-masing desa tentang pengisian kuesioner desa maju	a. Masih adanya isu tentang desa maju menjadi desa mandiri yang akan mengurangi ADD	1. Keraguan pada desa yang ada di Kecamatan Candi desa maju menuju desa mandiri

3.2 TELAAH VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Visi RPJMD yang merupakan visi dari Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2016. Adapun visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah "**Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani**". Sehubungan dengan itu, rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 adalah "**Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter, dan Berkelanjutan**". Visi tersebut memiliki unsur yang akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Sidoarjo Sejahtera menggambarkan kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan secara ekonomi, sosial, politik dan keamanan serta segala aspek kehidupan lainnya. Hal ini dicerminkan dari tingkat pendapatan perkapita, Indeks Pembangunan Manusia serta berbagai indikator lainnya seperti kualitas pendidikan, dan kesehatan. Pembangunan yang ingin diwujudkan dalam Visi ini tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan (growth) semata, namun juga akan ditekankan pada aspek pemerataan (equality). Hal ini dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya menjadi milik kelompok masyarakat tertentu, namun menjadi hak seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo tanpa terkecuali.

b. Sidoarjo maju merupakan manifestasi dari diksi "menjemput Perubahan". Segala sumberdaya pemerintahan dan sumberdaya alam akan dikelola dan diarahkan untuk kemajuan Sidoarjo. Kemajuan memiliki makna "terwujudnya keadaan yang lebih baik dari sebelumnya". Sehingga target pembangunan yang belum tercapai akan dtingkatkan pencapaiannya, dan yang telah tercapai akan ditingkatkan capaiannya. Segala upaya peningkatan capaian pembangunan tersebut tidak lain untuk kesejahteraan Masyarakat Sidoarjo di segala bidang.

c. Sidoarjo berkarakter merupakan Unsur penting dari konsep pembangunan People Centered Develompement atau pembangunan berpusat pada manusia adalah kokoh spiritual, mapan intelektual, kompetensi handal dan karakteristik sosial yang berpegang pada nilai agama dan nilai luhur budaya. Nilai (value) yang mendasari semangat

juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Karakteristik masyarakat kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan.

d. Pembangunan Berkelanjutan merupakan Pembangunan dilaksanakan di atas prinsip-prinsip berkelanjutan (sustainable development). Sidoarjo sebagai bagian dari masyarakat dunia memandang perlu untuk turut berperan aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) akan menjadi prinsip pembangunan di Kabupaten Sidoarjo

Misi merupakan perwujudan visi pembangunan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 dijabarkan kedalam 5 misi yaitu dijalankan secara berkesinambungan dengan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi serta pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Berikut ini 5 (Lima) misi tersebut:

Misi 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.

Penguatan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih, transparan dan tangkas merupakan syarat wajib bagi percepatan dan efektivitas pembangunan daerah. Sedangkan pelayanan publik yang berkualitas, inovatif dan merata serta mendukung kemudahan berusaha merupakan komitmen kepala daerah menyadari potensi dan letak geografis Kabupaten Sidoarjo ke depan yang harus semakin diperhitungkan. Tata Kelola dan Pelayanan publik merupakan faktor penting yang merupakan pilar penting good governance. Selanjutnya diyakini bahwa pemerintahan yang bersih dan sehat akan dapat melahirkan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi 2: Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandiirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri untuk Membukan Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.

Misi ini akan fokus pada penguatan ekonomi yang bertumpu pada sektor utama, yaitu perdagangan, industri pengolahan dan jasa serta secara simultan melakukan pengembangan secara optimal terhadap sector potensial lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan antar kelompok pendapatan serta pengentasan kemiskinan. Selain itu, misi ini juga akan diarahkan untuk pengelolaan ketenagakerjaan melalui pengembangan sektor ekonomi rakyat, yaitu koperasi, usaha mikro, pertanian dalam arti luasi khususnya sub sector perikanan yang menjadi keunggulan Kabupaten Sidoarjo. Intervensi kebijakan simultan ini diharapkan dapat memicu percepatan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dan berdampak pada pendapatan asli daerah yang mendorong kemandirian fiskal daerah.

Misi 3: Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan ingkungan.

Misi ini menekankan pada pentingnya pemenuhan kualitas infrastruktur dasar yang merata serta kualitas lingkungan hidup yang baik bagi masyarakat. Percepatan pembangunan segala sektor harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur yang memadai dan merata. Kabupaten Sidoarjo membutuhkan daya dukung infrastruktur pendorong ekonomi dan social yang terintegrasi dan terpadu menjamin keseimbangan pembangunan di wilayah perkotaan dan perdesaan. Peluang dan tantangan Kabupaten Sidoarjo yang masuk dalam Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (PKSN) Metropolis gerbangkertosusila dan titik penghubung bagi PKSN lainnya menjadi catatan penting. Namun demikian, guna menghindari dampak negatif pembangunan bagi kelestarian lingkungan, maka prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kata kunci bagi Kabupaten Sidoarjo.

Misi 4: Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.

Pembangunan berpusat pada manusia (people centered development) ini memberikan kesadaran pada seluruh dunia bahwa investasi pembangunan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (human resources) akan memberikan dampak yang besar pada percepatan

pembangunan jangka panjang. Terkait dengan hal tersebut, maka misi ini akan fokus pada upaya penguatan Sumber Daya Manusia, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan serta kebutuhan dasar lainnya. Membangun sumber daya unggul tentu meliputi berbagai aspek, antara lain terbentuknya karakter masyarakat yang luhur berbasis nilai-nilai budaya dan agama. Dinamika pembangunan dunia telah membuktikan bahwa penempatan nilai-nilai karakter budaya sebagai prinsip pembangunan akan mendorong pembangunan kearah yang lebih jelas.

Misi 5: Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Nilai (value) yang mendasari semangat juang dan pola hidup masyarakat memiliki peran penting dalam proses pembangunan. Nilai-nilai kegamaan yang berakulturasi dengan nilai-nilai tradisi luhur sebuah masyarakat akan membentuk karakter sosial yang khas. Karakteristik masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang tegas, lugas, namun tetap ramah dan hangat menjadi modal teramat besar bagi pembangunan Kabupaten Sidoarjo ke depan. Berpijak pada value tersebut, diyakini akan melahirkan tatanan masyarakat yang tertib, tentram, toleran dan memiliki penghargaan terhadap kesetaraan gender.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Perangkat Daerah Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan dan Sasaran KDH dan Wakil KDH terpilih	**Permasalahan Pelayanan OPD**	**Faktor**	
		Penghambat	**Pendukung**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Misi 1 : Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan			
Tujuan: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha **Sasaran 1:** Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital. **Sasaran 2:** Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha		1. Skill yang dimiliki SDM aparatur yang masih kurang sesuai dengan kualifikasi tuntutan kinerja yang ada di Kecamatan 2. Kurangnya pelatihan bagi aparatur tentang pelayanan publik yang prima 3. Tumpang tindih antara tugas yang menyulitkan dalam pembagian tugas sesuai tupoksi masing-masing kasi 4. Masih adanya isu tentang desa maju menjadi desa mandiri yang akan mengurangi ADD	1. Adanya inovasi dalam pemberian pelayanan publik yang berbasis IT 2. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan Publik berbasis IT 3. Adanya aplikasi yang mempercepat agar efektif dan efisien kinerja dari pelayanan publik yang ada di Kecamatan 4. Peningkatan anggaran yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur 5. Adanya pembinaan yang dilakukan kasi perekonomian untuk pengisian kuesioner pada IDM dan mendorong desa maju menuju desa mandiri

3.3 TELAAH RENSTRA KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN RENSTRA PROVINSI JAWA TIMUR

Pada telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa Timur akan dijelaskan mengenai tujuan dan sasaran yang ada pada Renstra Kementerian Dalam Negeri serta Renstra Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan tujuan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai di masa mendatang. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan yaitu sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah penjabaran berdasarkan tujuan dan sasarannya.

Tabel 3.3
Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis Renstra
Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024

No	Tujuan Strategis	Sasaran Strategis
(1)	(2)	(3)
1	Terwujudnya stabilitas politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa	a. Meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia b. Meningkatkan implementasi nilai-nilai Pancasila di Daerah c. Meningkatnya kewaspadaan nasional d. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas
2	Peningkatan kapsaitas dan sinergi pembangunan pusat dan daerah, serta pelayanan publik yang berkualitas dan penguatan inovasi	a. Meningkatnya kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam negeri b. Meningkatnya harmonisasi kualitas produk hukum pusat dan daerah c. Meningkatnya tata kelola pemerintahan dalam negeri yang adaptif, profesional, proaktif, dan inovatif d. Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan e. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan kewilayahan
3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dan lingkungan Kementerian dalam Negeri	a. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri b. Terwujudnya Kementerian Dalam Negeri yang akuntabel dan berintegritas c. Meningkatnya kemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan sebagai rujukan utama dalam penataan kebijakan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri

Tabel 3.4
Telaah Renstra Kementerian

No	Sasaran Strategis Jangka Menengah Renstra Kementerian	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terjaminnya hak-hak keperdataan setiap warga negara dalam aspek kependudukan untuk semua keperluan	1. kurangnya perlengkapan penunjang teknis berbasis teknologi dalam melakukan pelayanan 2. belum optimalnya sistem administrasi perkantoran baik ditingkat kecamatan maupun desa 3. belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana dalam penunjang kinerja pelayanan 4. Belum matangnya perencanaan kinerja secara teknis pada kegiatan kecamatan dan desa 5. Belum terbangunnya sistem antar OPD dan desa untuk mempertahankan IDM sebagai desa maju.	1. Kualitas pelayanan publik yang belum optimal 2. Skill yang dimiliki SDM aparatur yang masih kurang sesuai dengan kualifikasi tuntutan kinerja yang ada di Kecamatan 3. Kurangnya pelatihan bagi aparatur tentang pelayanan publik yang prima 4. Tumpang tindih antara tugas yang menyulitkan dalam pembagian tugas sesuai tupoksi masing-masing kasi 5. Kurangnya pemahaman desa tentang pentingnya kemajuan dalam IDM dan kelengkapan data yang dibutuhkan	1. Dilakukan pelatihan serta pembinaan tentang strandarisasi pelayanan publik yang prima dengan responsif terhadap kebutuhan masyarakat 2. Adanya inovasi dalam pemberian pelayanan publik yang berbasis IT 3. Kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelayanan Publik berbasis IT 4. Adanya aplikasi yang mempercepat agar efektif dan efisien kinerja dari pelayanan publik yang ada di Kecamatan 5. Peningkatan anggaran yang dibutuhkan untuk sarana dan prasarana yang menunjang kinerja aparatur 6. Adanya pembinaan yang dilakukan kasi perekonomian untuk pengisian kuesioner pada IDM

3.4 TELAAH RANCANGAN TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Pada Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 – 2029. Telaah terhadap RTRW bertujuan agar pembangunan lima tahun kedepan tidak menyimpang dengan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan. Dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo 2009-2029, disebutkan bahwa fungsi RTRW kabupaten antara lain:

a. Sebagai matra ruang dari pembangunan daerah
b. Sebagai dasar pengaturan pemanfaatan ruang serta pengendalian pemanfaatan ruang di daerah
c. Sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan antar sektor dan antar wilayah

Sedangkan tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan:

a. Mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; serta
c. Mewujudkan pelindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Penelahaan RTRW dan KLHS haruslah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah tersebut, dalam hal ini perlu dipahami bahwa tugas dan fungsi Kecamatan Candi tidak secara langsung berkaitan dengan urusan dalam RTRW maupun KLHS. Tupoksi Kecamatan Candi lebih mengarah pada fungsi koordinasi dan fasilitasi. Oleh karena itu dalam telaah ini kedudukan Kecamatan Candi hanya sebagai pendukung pelaksanaan RTRW dan KLHS. Sehingga isu yang muncul berdasarkan RTRW maupun KLHS tidak dapat secara langsung terselesaikan melalui program dan kegiatan pada Kecamatan.

Tabel 3.5
Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo

No	Rencana Pengembangan Kawasan Terkait Tugas Perangkat Desa	Permasalahan Pelayanan OPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	1. Kawasan Pemukiman pedesaan maupun perkotaan 2. Kawasan Peruntukan Lahan 3. Kawasan Industri 4. Kawasan Pariwisata	1. Kurangnya koordinasi dengan multi stakeholder untuk alih fungsi dari lahan yang ada di Kecamatan 2. Belum optimalnya pelayanan tentang dokumen IMB, SKTS, legalisasi salinan dokumen kependudukan, AK I, AK II, AKIII, AK IV, dan AK V, rekomendasi penutupan atau penggunaan jalan lokal atau desa, SIUP mikro, HO usaha mikro dan TDP usaha mikro	1. Terbatasnya kewenangan kecamatan 2. Lemahnya koordinasi antar stakeholder 3. Tekanan pada eknomi politik tentang pengusaha pengembangan dan industri 4. Kualitas pelayanan yang dirasakan belum optimal 5. Kurang pemahaman sistem administrasi berbasis IT 6. Kurangnya sosialisasi dan ketersediaan informasi terkait pelayanan yang diberikan oleh kecamatan	1. Pertumbuhan ekonomi, usaha, dan peluang pekerjaan 2. Ketersediaan hunian untuk rumah layak huni 3. Pengembangan wilayah kecamatan Candi 4. Tersedianya moda transportasi 5. Tersedianya air bersih 6. Peningkatan perolehan IMB, SKTS, legalisasi salinan dokumen kependudukan, AK I, AK II, AKIII, AK IV, dan AK V, rekomendasi penutupan atau penggunaan jalan lokal atau desa, SIUP mikro, HO usaha mikro dan TDP usaha mikro

3.5 PENENTU ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Bupati Sidoarjo, Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, maka isu-isu strategis yang terkait adalah

1. Peningkatan skill pada kompetensi dan kualifikasi pegawai di Kecamatan Candi
2. Peningkatan Aplikasi pada Sistem IT sebagai penunjang kinerja pelayanan yang efektifitas, efisiensi, responsibiltas, akuntabilitas, dan transparan dengan tepat waktu
3. Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
4. Penambahan Anggaran sebagai penunjang Sarana dan Prasarana
5. Koordinasi yang selaras antar OPD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan baik
6. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar terselenggaranya kinerja yang profesionalitas dan akuntabilitas
7. Terwujudnya Kecamatan Candi sebagai Desa Maju

Metode penentu isu-isu strategis pelayanan PD antara lain dapat dilakukan dengan cara:

1. Dibahas melalui forum *Focussed Group Discussion* (FGD) dengan melibatkan para pakar yang memiliki pengalaman merumuskan isu-isu strategis.
2. Menggunakan metode pembobotan dengan cara sebagai berikut:
   a. Menentukan skor terhadap masing-masing kriteria yang telah ditetapkan, dengan mengisi tabel dengan contoh sebagai berikut:
   b. Melakukan penilaian isu strategis terhadap kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan skala tersebut, dengan mengisi tabel sebagai berikut:

Tabel 3.6
Skor Kriteria Penentu Isu-Isu Strategis

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab SKPD	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20

No	Kriteria	Bobot
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Berdasarkan skor kriteria penentu isu strategi telh ditentukan hasil penilaian isu strategis sebagai berikut:

Tabel 3.7
Total Skor Isu-Isu Strategis

No	Isu Strategis	Total Skor						Total Skor
		1 (0,20)	2 (0,10)	3 (0,20)	4 (0,10)	5 (0,15)	6 (0,25)	7 (100)
1	Peningkatan skill pada kompetensi dan kualifikasi pegawai di Kecamatan Candi	5	5	5	5	5	4	4,75
2	Peningkatan Aplikasi pada Sistem IT sebagai penunjang kinerja pelayanan yang efektifitas, efisiensi, responsibiltas, akuntabilitas, dan transparan dengan tepat	5	5	5	5	5	3	4,50
3	Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	5	5	5	5	5	2	4,25
4	Penambahan Anggaran sebagai penunjang Sarana dan Prasarana	5	5	5	5	5	2	4,25
5	Koordinasi yang selaras antar OPD untuk penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan baik	5	5	5	5	5	3	4,5
6	Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar terselenggaranya kinerja yang profesionalitas dan akuntabilitas	5	5	5	5	5	5	4,5
7	Terwujudnya Kecamatan Candi sebagai Desa Maju	5	5	5	5	5	4	4,75

Berdasarkan hasil skoring diatas, diketahui bahwa untuk menjawab isu strategis terkait Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, Kecamatan Candi perlu memprioritaskan Peningkatan skill pada kompetensi dan kualifikasi pegawai di

Kecamatan Candi dan Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan desa agar terselenggaranya kinerja yang profesionalitas dan akuntabilitas. Hal ini dikarenakan skill atau kualifikasi tenaga ahli yang mumpuni akan mempengaruhi dalam berbagai kinerja yang ada pada Kecamatan Candi serta profesionalisme dan akuntabilitas merupakan pengukuran kinerja kecamatan terutama pada camat yang telah tertera pda 13 pelimpahan bupati kepada camat sebagai berikut:

Tabel 3.8
Rincian Kewenangan Bupati Yang Dilimpahkan Kepada Camat

No	Bidang	Uraian Urusan Pemerintahan	Jenis Kegiatan	Sasaran	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Evaluasi Rancangan Peraturan Desa terkait APBDes, pungutan, tata ruang dan Organisasi Pemerintah Desa 2. Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Kepala Desa 3. Klarifikasi Peraturan Desa/ Produk Hukum Desa 4. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan aset desa 5. Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (pilkades), Perangkat Desa dan BPD 6. Fasilitasi penanganan konflik pemerintahan dan konflik sosial dalam lingkup kecamatan 7. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran keuangan desa setiap triwulan 8. Pengesahan pergantian antar waktu dan pemberhentian karena pergantian antar waktu anggota Badan Permusyawaratan Desa 9. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pedesaan 10. Memandu pengucapan sumpah/ janji Anggota BPD 11. Fasilitasi Program Pemberdayaan Ekonomi Penduduk Miskin dan usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) 12. Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan (RT/RW)	Fasilitas	Desa	Seksi Pemerintahan
2	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Penerbitan dan penandatanganan IMB rumah tinggal IMB rumah tinggal satu lantai dengan maksimal luas bangunan 400 m2 (empat ratus meter persegi) selain IMB awal pembangunan perumahan 2. Penerbitan izin reklame insidentil 3. Pemeliharaan Jalan rutin Kabupaten 4. Pembangunan saluran dan pemeliharaan pematusan	Pelayanan	Masyarakat	Seksi Pembangunan

No	Bidang	Uraian Urusan Pemerintahan	Jenis Kegiatan	Sasaran	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil	1. Legalisasi salinan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil 2. Rekam dan Cetak KTP Elektronik 3. Entry dan cetak kartu keluarga 4. Percetakan KIA (Kartu Identitas Anak)	Pelayanan	Masyarakat	Seksi Pemerintahan
4	Perhubungan	1. Melaksanakan pendataan usaha angkutan sungai di wilayah kecamatan setempat 2. Pemasangan rambu-rambu di jalan antar desa (Rambu Petunjuk Batas Wilayah dan Papan Nama Jalan)	Pendataan		Seksi Pembangunan
5	Tenaga Kerja	1. Pelayanan dan penandatanganan AK I (Kartu Kuning) 2. Pelatihan peningkatan keterampilan dasar tanpa sertifikat	Pelayanan	Masyarakat	Seksi Pemerintahan
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1. Pelaksanaan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan kualitas keluarga 2. Penyusunan data terpilah gender dan anak tingkat kecamatan 3. Pembinaan organisasi perempuan 4. Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 5. Sosialisasi pencegahan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 6. Pencatatan dan pelaporan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 7. Pengkoordinasian Pelaksanaan dan Pembinaan Program Kecamatan Kelurahan/ Desa Layak Anak/ Ramah Anak 8. Sosialisasi tentang pengarusutamaan Hak Anak (PUHA)	Fasilitasi, Pembinaan dan Sosialisasi	Masyarakat	Seksi Kesejahteraan Sosial
7	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Pelaksanaan pembinaan kader Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL) 2. Pengkoordinasian pelaksanaan program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) serta pencegahan generasi muda dari ancaman HIV/AIDS	Pembinaan	Masyarakat	Seksi Kesejahteraan Sosial
8	Perindustrian	1. Penyelenggaraan penyuluhan penumbuhan wirausaha baru 2. Penerbitan dan Penandatanganan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Pelayanan	Pelaku Usaha	Seksi Perekonomian

No	Bidang	Uraian Urusan Pemerintahan	Jenis Kegiatan	Sasaran	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Perdagangan	1. Promosi produk industri dan dagang kecil/ mikro di wilayah kecamatan 2. Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro	Pelayanan	Pelaku Usaha	Seksi Perekonomian
10	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	1. Pelaksanaan kegiatan cipta sosial kemasyarakatan wilayah kecamatan melalui fortokopimka (Forum Komunikasi Pimpinan di Kecamatan) 2. Aktivasi posko kesiapsiagaan bencana 3. Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkotika (P4GN) 4. Penertiban pedangan kaki lima (PKL) difasilitas umum dan fasilitas sosial milik pemerintah daerah diwilayah kecamatan setempat. 5. Penertiban bangunan tidak berijin diwilayah kecamatan septempat. 6. Penertiban penyandang masalah kesejahteraan sosial serta kenakalan remaja diwilayah kecamatan setempat. 7. Penertiban reklame insidentil diwilayah kecamatan setempat. 8. Pembinaan anggota linmas diwilayah kecamatan setempat	Pembinaan	PMKS	Seksi Kesejahteraan Sosial
11	Lingkungan Hidup	1. Pembinaan, pengurangan dan penanganan sampah di wilayah kecamatan (DLHK) 2. Rehabilitasi Ruang Terbuka Hijau (RTH) Tematik (DLHK) 3. Penanaman pohon lindung 4. Pembangunan dan penerangan jalan lingkungan	Pembangunan		Seksi Pembangunan
12	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1. Rehabilitasi Jalan Lingkungan. 2. Penataan dan Peremajaan Sentra Pedangan Kaki Lima (PKL). 3. Pembangunan Jamban Sehat. 4. Pemberian Bantuan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan		Seksi Pembangunan
13	Sosial	Pemberian bantuan kepada Fakir Miskin	Fasilitasi	PMKS	(diampu langsung oleh Dinas Sosial pada anggaran

No	Bidang	Uraian Urusan Pemerintahan	Jenis Kegiatan	Sasaran	PIC
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					bantuan fakir miskin) Seksi Kesejahteraan Sosial (hanya sebagai fasilitator)

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Visi RPJMD yang merupakan Visi Kepala Daerah terpilih harus sejalan dengan Visi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2026. Adapun Visi RPJPD Kabupaten Sidoarjo adalah **"Mewujudkan Masyarakat yang Mandiri, Sejahtera, dan Madani"**. Sehubungan dengan itu, maka rumusan Visi RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2021-2026 ini adalah **"Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan"**. Dalam mewujudkan visi tersebut perlu adanya penjabaran Visi dalam 5 Misi, dijalankan secara berkesinambungan dan strategis serta memfokuskan pada pengembangan sektor-sektor ekonomi dan pengembangan sumber daya manusia sebagai basis pengembangan kemakmuran masyarakat Sidoarjo yang mandiri, berikut 5 (Lima) misi tersebut yaitu:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha.
2. Membangkitkan Pertumbuhan Ekonomi dengan Fokus pada Kemandirian Lokal Berbasis Usaha Mikro, Koperasi, Pertanian, Perikanan, Sektor Jasa dan Industri Untuk Membuka Lapangan Pekerjaan dan Mengurangi Kemiskinan.
3. Membangun Infrastruktur Ekonomi dan Sosial yang Modern dan Berkeadilan dengan Memperhatikan Keberlanjutan Lingkungan.
4. Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dan Berkarakter Melalui Peningkatan Akses Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan serta Kebutuhan Dasar Lainnya.
5. Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga

Untuk mendorong tercapainya Visi Pembangunan Kabupaten Sidoarjo, maka peran dari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terletak pada misi 1 (satu) yakni **"Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**. Untuk menjawab tujuan, indikator tujuan dan sasaran yang tertera pada RPJMD, maka setiap OPD wajib menjabarkan melalui tujuan dan sasaran OPD. Berikut dirumuskan tujuan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

1. **Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan**
2. **Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah**

Selain tujuan OPD dirumuskan sasaran dari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu kecamatan
2. Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target

Sasaran RPJMD :
1. **Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital**
2. **Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target capaian kinerja					Sasaran	Indikator Sasaran	Target capaian kinerja				
			2022	2023	2024	2025	2026			2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SKM	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu kecamatan	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93
	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan	BB	BB	BB	BB	A	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan dan di Anggarkan ke Candi Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
									Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	90,90%	91,30%	95,65%	100%	100%

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 STRATEGI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Strategi adalah langkah yang berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap. Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo yang sinergis dengan tugas dan fungsi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Dengan tujuan meningkatnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan

a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya;
b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);
c. legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan;
d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V);
e. rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa;
f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro;
g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro;
h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.

Strategi Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 dapat ditentukan melalui alternatif-alternatif strategi yang dianalisis dengan menggunakan metode analisis SWOT yaitu dengan menelaah dan mengidentifikasi faktor internal (Aspek Kekuatan an Aspek Kelemahan) dan Faktor Eksternal (Aspek Tantangan dan Aspek Ancaman). Sehingga jika berdasarkan pada faktor internal dan faktor eksternal dapat dianalisis lebih mendalam untuk kelanjutan sebagai penentu, pengambil, serta penerapan strategi maupun kebijakan Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam,

perwujudan ketersediaan pelayanan dalam tujuan meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan dan tangkas berbasis digital serta pelayanan publik berkualitas yang mendukung kemudahan berusaha. Berikut merupakan identifikasi dari faktor internal dan faktor eksternal:

Tabel 5.1
Analisis Faktor Internal
Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Faktor Lingkungan Internal
1. Kekuatan (*Strengths*)
1) Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat
2) Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo.
3) Tersedianya anggaran yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan program kegiatan di Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
4) Kemampuan teknis yang cukup baik dan memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan teknis operasional yang disesuaikan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada masing-masing bidang
5) Ketersediaan sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan teknis operasional kegiatan pada masing-masing bidang
6) Ketersediaan tenaga ahli pada sistem berbasis IT untuk aplikasi pelayanan publik dengan inovasi pelayanan
7) Adanya komunikasi yang baik dan lancar dalam bentuk komunikasi satu arah maupun dua arah antara sesama pegawai maupun dengan pimpinan
8) Adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur atau garis komando maupun instruksi kerja yang telah ditetapkan
9) Tersedianya transparansi yang telah dikembangkan oleh Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui aplikasi SIPRAJA, PLAVON DUKCAPIL, dan BMW
2. Kelemahan (*Weakness*)
1) Pemahan yang kurang untuk desa sebagai pengisian sebagai kualifikasi IDM
2) Masih terdapat anggaran keuangan yang belum tanggap dan belum terserap dengan maksimal di beberapa bidang
3) Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan sarana dan prasarana untuk pelayanan dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Kecamatan
4) Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada inovasi pelayanan
5) Belum optimanya standart pembinaan dan pengawasan pada pengisian IDM

Tabel 5.2
Analisis Faktor Eksternal Kecamatan Candi

Faktor Lingkungan Eksternal	
1	**Peluang (*Opportunity*)**
	1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah
	2) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tentang Hasil Verifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Pembangunan dan Keuangan Daerah
	3) Dukungan dana dari pihak-pihak terkait sebagai relasi rekanan dalam kerjasama pengadaan barang
	4) Tuntutan masyarakat akan keterbukaan pelayanan publik
	5) Kemudahan masyarakat akses dan memahami prosedur pelayanan
	6) Pengguna layanan masyarakat sudah familiar dengan kemudahan pembayaran
	7) Tingginya kebutuhan data oleh khalayak publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik dan transparansi kepada masyarakat
2.	**Ancaman (*Threat*)**
	1) Kurangnya pemahaman desa tentang pentingnya peran masyarakat pada IDM
	2) Masih adanya tidak ada IMB untuk masyarakat yan mendirikan bangunan
	3) Kurangnya penyuluhan rutin dan penyebarluasan kebijakan pelayanan Kecamatan kepada publik
	4) Kondisi luas wilayah dan jumlah penduduk Kecamatan Candi serta wilayah yang langsung berbatasan dengan jalan provinsi mengakibatkan susahnya melakukan pengawasan pada kegiatan desa

Tabel 5.3
Analisis SWOT

	Opportunity	Threat
Strength	**S-O:** 1. Adanya regulasi yang jelas dalam mengatur segala kebutuhan, pelimpahan tugas serta keuangan untuk Kecamatan 2. Meningkatkan jumlah sarana dan prasarana pada pelayanan yang prima dengan sistem IT dengan dedikasi inovasi pelayanan agar tercapainya efektifitas, efisiensi, responsifitas, akuntabilitas 3. Koordinasi yang dibutuhkan pada masing-masing bidang dan kasi untuk pelimpahan 13 tugas kecamatan yang terdiri berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, terdiri dari: a. Pemberdayaan masyarakat b. Pekerjaan umum dan penataan ruang c. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil d. Perhubungan e. Tenaga kerja f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana h. Perindustrian i. Perdagangan j. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat k. Lingkungan hidup l. Perumahan dan pengawasan permukiman m. Sosial 4. Penerapan aplikasi yang mendukung inovasi pelayanan Kecamatan yang prima secara online seperti pada pelayanan: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai kewenangannya; b. Surat Keterangan Tinggal Sementara (SKTS);	**S-T:** 1. Memberikan arahan dan pemahaman kepada desa tentang pentingnya peran desa akan IDM (*https://idm.kemendesa.go.id/*)untuk menuju desa maju ke desa mandiri dengan beberapa syarat yaitu: a. Identitas Petugas : dilengkapi dengan identitas petugas pengisi kuesioner terdiri dari nama, tanggal pengisian dan nomor telp/ hp petugas; b. Identitas Desa : dilengkapi dengan identitas informan sebagai perangkat desa, informasi umum mengenai Desa, mulai dari lokasi, informasi Kepala Desa beserta jajarannya serta informasi umum lainnya; c. Data Geografi, Topografi dan Demografi : dilengkapi dengan pengisian luas wilayah Desa dan Hutan Desa pada bagian Data Geografi; Jenis Wilayah Desa pada Data Topografi; jumlah total penduduk, jumlah penduduk laki-laki, jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk pendatang s.d tahun 2019 dan jumlah penduduk pergi s.d tahun 2019 pada sub bagian Penduduk bagian Demografi; jumlah total kepala keluarga, jumlah total kepala keluarga perempuan dan jumlah keluarga miskin pada sub bagian Kepala Keluarga, pada sub bagian jumlah penduduk berdasarkan struktur usia <1 tahun, 1-4 tahun, 5-14 tahun, 15-39 tahun, 40-64 tahun dan 65 tahun keatas serta pada sub bagian jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan dilengkapi data jumlah petani, nelayan, buruh tani/nelayan, buruh pabrik, PNS, pegawai swasta, wiraswasta/pedagang, TNI, POLRI, Dokter, Bidan, Perawat dan pekerjaan lainnya;

	c. legalisasi Salinan Dokumen Kependudukan; d. Kartu Ketenagakerjaan (AK I, AK II, AK III, AK IV, dan AK V); e. rekomendasi penutupan/ penggunaan jalan lokal/ desa; f. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Mikro; g. Izin Gangguan (HO) Usaha Mikro; h. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Usaha Mikro.	d. Dimensi Sosial : dilengkapi dengan data pada bagian kesehatan yang terdiri dari data ketersediaan sarana kesehatan, rumah sakit, rumah sakit bersalin, puskesmas rawat inap, puskesmas tanpa rawat inap, puskesmas pembantu, rumah bersalin, poliklinik/balai pengobatan, tempat praktek dokter, tempat praktek bidan, apotik, ketersediaan tenaga kesehatan bidan, ketersediaan tenaga kesehatan dokter, ketersediaan tenaga kesehatan lainnya, akses ke poskesdes/ polindes dan posyandu, tingkat kepesertaan BPJS/JKN/KIS, derajat kesehatan dan gizi buruk, sasaran 1000 hari pertama kehidupan (HPK), pengukuran tikar pertumbuhan usia anak 0-23 bulan, dan kelengkapan konvergensi paket layanan pencegahan stunting bagi 1000 HPK. Pada bagian pendidikan, dilengkapi dengan data terkait akses ke pendidikan dasar dan menengah, data tingkat pendidikan, akses ke pendidikan non-formal usia 3-5 tahun, dan akses pengetahuan, modal sosial, keamanan warga, kesejahteraan sosial. Pada bagian permukiman, dilengkapi dengan data terkait akses air bersih dan air minum, akses sanitasi, akses listrik, dan akses informasi & komunikasi; e. Dimensi Ekonomi : dilengkapi dengan data terkait keragaman produksi masyarakat desa, akses ke pusat perdagangan, akses distribusi / logistik, akses Lembaga keuangan, ketersediaan Lembaga ekonomi, dan keterbukaan wilayah; f. Dimensi Ekologi : dilengkapi dengan data terkait kondisi lingkungan dan potensi bencana; g. Aktivitas Desa : dilengkapi dengan data terkait ketersediaan Pendamping Lokal Desa, jumlah Pendamping Lokal Desa di kecamatan, jumlah anggota Kader pembangunan Masyarakat Desa yang

		aktif, jumlah anggota Tim Perumusan RPJMDes yang aktif, ketersediaan kebun gizi di Desa yang dimanfaatkan masyarakat, sumber pangan yang paling sering dikonsumsi masyarakat desa dan terdapat peraturan desa mengenai kesehatan dan pendidikan; h. Sumber Pendapatan Desa : dilengkapi dengan data terkait PAD (Pendapatan Asli Desa) Tahun Sekarang, PAD Tahun Sebelumnya, Dana Desa Tahun Sekarang, Dana Desa Tahun Sebelumnya, Bantuan Provinsi Tahun Sekarang, Bantuan Provinsi Tahun Sebelumnya, Bantuan Kabupaten/Kota Tahun Sekarang, dan Bantuan Kabupaten/ Kota Tahun Sebelumnya; i. Aset dan Kekayaan Desa : dilengkapi dengan data terkait asset dan infrastruktur yang ada di Desa diantaranya tanah, bangunan Kantor Desa, Balai Desa, bangunan Desa lainnya, Pasar Hewan, Pasar Pelelangan Ikan, Pasar Pelelangan Hasil Pertanian, Pasar Desa lainnya dan asset Desa lainnya. Disamping itu, dilengkapi juga dengan data penyebaran informasi APBDes disebarkan ke masyarakat; j. Total Belanja APBDes : dilengkapi dengan data terkait bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun Sebelumnya dan Sekarang, bidang pelaksanaan pembangunan Desa tahun Sebelumnya dan Sekarang, bidang pembinaan kemasyarakatan Desa tahun Sebelumnya dan Sekarang, bidang pemberdayaan masyarakat Desa tahun Sebelumnya dan Sekarang, bidang penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat Desa tahun Sebelumnya dan Sekarang; k. Jarak, Waktu dan Biaya Desa ke Kecamatan dan Kabupaten : dilengkapi dengan data terkait jarak

		kantor Desa ke kantor Camat dan waktu tempuhnya, total biaya transportasi dari kantor Desa ke kantor Camat, jarak kantor Desa ke kantor Bupati/Walikota dan waktu tempuhnya, serta total biaya transportasi dari kantor Desa ke kantor Bupati/ Walikota. 2. Menggunakan aplikasi utnuk masyarakat yang memiliki mobilitas yang tinggi agar dapat mendapatkan pelayanan yang optimal dan prima dengan efektif dan efisien dalam waktu.
Weakness	**W-O:** 1. Penambahan pengadaan dana untuk sarana dan prasarana agar tercapainya program, kegiatan, sub kegiatan yang diselenggarakan 2. Melakukan koordinasi melalui materi perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan agar realiasi yang sesuai dengan target setiap tahunnya.	**W-T:** 1. Sosialisasi tentang penyelenggaraan pemerintah desa 2. Koordinasi anatar bidang pada OPD yang diperbaiki agar tupoksi bisa dilaksanakan.

Pada pengelolaan data selanjutnya akan dilakukan analisis dengan IFE dan EFE matrix berdasarkan kondisi internal dan eksternal dari perusahaan tersebut. IFE matrix (Internal Factor Evaluation) merupakan matrix yang menampilkan data internal perusahaan baik faktor yang menjadi kekuatan (strength) maupun kelemahan (weakness). EFE (External Factor Evaluation) merupakan matriks yang menampilkan data eksternal perusahaan baik faktor yang menjadi peluang (opportunity) maupun ancaman (threat). Berikut ini adalah tabel dari IFE dan EFE matrix

Tabel 5.4
IFE dan EFE Matrix

STRENGTHS		SCORE	BOBOT	TOTAL
S1	Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat	4	0,3	1,2
S2	Tersedianya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dam Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sidoarjo	4	0,2	0,8
S3	Tersedianya SOP dalam melaksanakan pelayanan kpada masyarakat	4	0,2	0,8
S4	Adanya komunikasi yang baik dan lancar antar sesama pegawai maupun dengan pimpinan	3	0,1	0,3
S5	Adanya Kerjasama dan koordinasi yang baik dari lingkup internal yang disesuaikan dengan alur atau garis komando maupun intruksi kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan SOTK	3	0,2	0,6
Tota			1	3,7
WEAKNESS				
W1	Terbatasnya anggaran dalam mengembangkan dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk pelayanan dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Kecamatan	4	0,25	1
W2	Kurangnya penyediaan sarana dan prasarana pada inovasi pelayanan	3	0,25	0,75
W3	Kurangnya jumlah sarana dan prasarana dibutuhkan	3	0,15	0,45
W4	Terbatasnya kualitas SDM tenaga ahli inovasi pelayanan yang berlatar pada kualifikasi system IT	4	0,15	0,6
TOTAL			1	3,6
SELISIH				0,1
Opportunity				
O1	Penerapan Otonomi Daerah memberikan kesempatan bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	4	0,40	1,6
O2	Berkembangnya teknologi yang dapat dimanfaatkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik	4	0,35	1,4

STRENGTHS		SCORE	BOBOT	TOTAL
TOTAL			1	4
Threats				
T1	Mobilitas masyarakat yang tinggi mengakibatkan kesulitan pada administrasi kependudukan	4	0,55	2,2
T2	beragam tuntutan dan aspirasi masyarakat dari berbagai kepentingan yang menimbulkan pertentangan	3	0,45	1,35
TOTAL			1	3,55
SELISIH				0,45

Berdasarkan tabel diatas maka didapatkan nilai faktor internal dan eksternal sebesar 0,3 dan 1. Selanjutnya akan dilakukan analisis SWOT map untuk mengetahui strategi yang sesuai untuk digunakan perusahaan berdasarkan analisis faktor intenal dan eksternal. Berikut ini adalah gambar dari SWOT map:

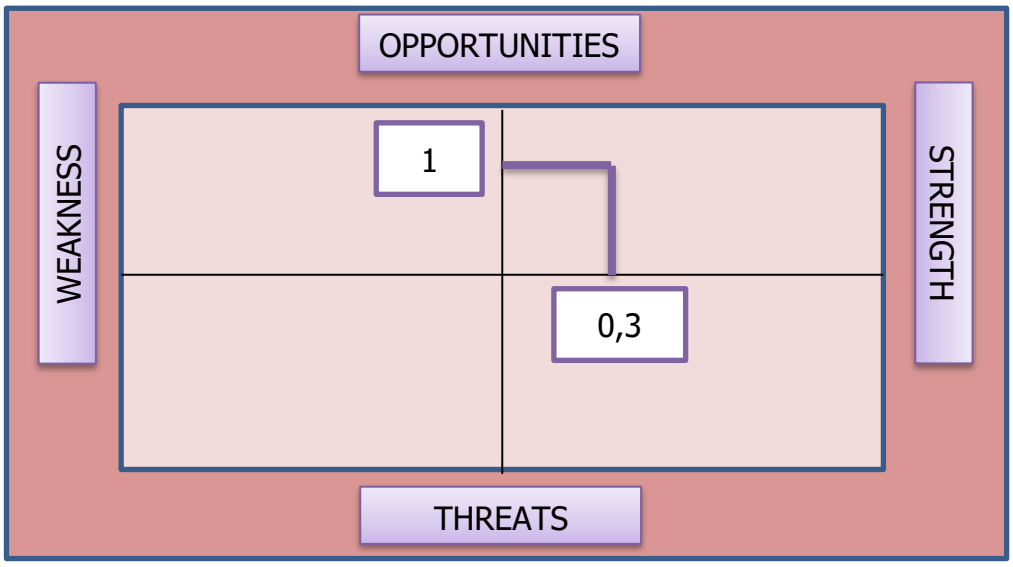

Kecamatan Candi dengan pendekatan strenghts - opportunity (SO Strategy) dalam menyusun strategi dan kebijakan. Strategi pengembangan pelayanan pada Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo terdiri dari:

1. Meningkatkan dan pemeliharaan pada sarana dan prasarana agar tercapainya pelaynan yang prima serta kelengkapan sarana dan prasarana pada perlengkapan kantor baik secara pemeliharaan maupun pengadaan untuk kebutuhan operasional aparatura di Kecamatan Candi
2. Menerapkan aplikasi untuk mendukung pelayanan yang prima dengan beberapa aplikasi yang dapat diterapkan sebagai berikut:
   a. BMW (Berkas Mlaku Dewe), yaitu aplikasi yang teritegrasi antara desa dan kecamatan, untuk pembuatan permohonan Pindah, Pengantar SKTM, pengantar Ijin Keramaian, Pengantar SKCK, surat kelahiran, surat kematian, pengantar pembuatan KK, Pengantar Pembuatan KTP
   b. Plavon (Pelayanan Via Online) Dukcapil, yaitu aplikasi yang teritegrasi antara desa dan kecamatan, untuk pembuatan KTP, KIA, akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga dan dokumen kependudukan lainnya ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil secara onlin

c. SIPRAJA (Sistem Pelayanan Rakyat Sidoarjo), yaitu pelayanan berbasis online yang bisa di akses melalui website maupun download Play Store. aplikasi ini dibagi dengan 3 Tipe yaitu Tipe A terdiri dari surat Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat Keterangan Biodata Penduduk, Surat Keterangan Desa Umum, dan Surat Keterangan Domisili Usaha. Tipe B terdiri dari Surat Pengantar KK dan KTP dari Desa, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Umum Kecamatan, dan Surat Keterangan Tidak Mampu Kecamatan. Terakhir, Tipe C terdiri dari Izin Mendirikan Bangunan, Kartu Pencari Kerja (AK-I), Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), dan Tanda Daftar Perusahaan Usaha Mikro. (adm)

3. Meningkatkan koordinasi pada masing bidang Pemrintahan, Bidang Perekonoian, Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum, Bidang Kesejahteraan Sosial, Bidang Pembangunan yang sesuai dengan tupoksi pada 13 delegasi pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, yaitu:
   a. Pemberdayaan masyarakat
   b. Pekerjaan umum dan penataan ruang
   c. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
   d. Perhubungan
   e. Tenaga kerja
   f. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
   g. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
   h. Perindustrian
   i. Perdagangan
   j. Ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
   k. Lingkungan hidup
   l. Perumahan dan kawasan permukiman
   m. Sosial
4. Melakukan pemetaan indikator desa maju masing-masing desa untuk dievaluasi secara berkala untuk dilakukan peningkatan;

5. Mensinergikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Tahunan Desa (RKPDes) guna mempertahankan IDM Kecamatan Candi sebagai Desa Maju

5.2 ARAH KEBIJAKAN KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO

Pada arah kebijakan merupakan arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan tersebut. Kabijakan dari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah:

1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT
2. Evaluasi secara berkala megenai pelayanan sesuai dengan SOP
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan
4. Melakukan koordinasi antar OPD yang ada di Kecamatan Candi
5. Meningkatkan kinerja perangkat Kecamatan
6. Meningkatkan IDM Kecamatan Candi sebagai Desa Maju

Tabel 5.5
Tujuan, Sasaran, Strategis, dan Kebijakan

VISI : **Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju, Berkarakter dan Berkelanjutan.**			
MISI 1: **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha**			
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Kebijakan**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Mengembangkan sistem pelayanan kepada masyarakat berbasis sistem IT memudahkan jangkauan dalam akses pada masing-masing desa	1. Mengembangkan inovasi pelayanan berbasis IT 2. Evaluasi secara berkala megenai pelayanan sesuai dengan SOP 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan evaluasi pelayanan 4. Melakukan koordinasi antar OPD yang ada di Kecamatan Candi 5. Meningkatkan kinerja perangkat kecamatan 6. Meningkatkan IDM Kecamatan Candi sebagai Desa Maju
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Meningkatkan kualitas koordinasi dengan desa dan Stakeholder lain untuk mencapai predikat desa maju	

Untuk menjalankan strategi dan arah kebijakan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka dilaksanakanan program perangkat daerah. Program tersebut merupakan penjabaran dari kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih dari kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Tabel 5.6
Keterkaitan Tujuan, Sasaran OPD

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU OPD)	Program
Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang bersih, trasnparan dan tangkas berbasis digital	Meningkatnya Kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan administrasi terpadu Kecamatan	1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 2. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan
Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan dan di Anggarkan ke Candi Dilaksanakan Dengan Baik	
				Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU OPD)	Program
					Peraturan Kepala Daerah 3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah 4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa 5. Program penunjang urusan pemerinathan daerah kabupaten/kota a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sasaran RPJMD	Tujuan OPD	Indikator Tujuan	Sasaran OPD	Indikator Sasaran Perangkat Daerah (IKU OPD)	Program
					c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah d. Administrasi Umum Perangkat Daerah e. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah g. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah i. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah j. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

BAB VI
RENCANA PROGRAM
DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 RENCANA PROGRAM

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Program dan Kegiatan Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo yang direncanakan untuk periode tahun 2021 – 2026 meliputi:

1. Program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
   b. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
   c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2. Program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum
   a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
   b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah

3. Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum
   a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

4. Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

5. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
   e. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
   f. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   g. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
   h. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Kecamatan Candi Tahun 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian c. Prosentase desa yang sudah mengisi dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai ketentuan d. Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**124.534.640**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**128.270.679**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**132.118.800**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**136.082.364**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**140.164.834**
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP**	**100%**	**124.534.640**	**100%**	**128.270.679**	**100%**	**132.118.800**	**100%**	**136.082.364**	**100%**	**140.164.834**
					Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. persentase pelayanan umum yang telah diselesaikan b. Jumlah peserta sosialisasi pelayanan umum	a. 100 % b. 80 orang	124.534.640	a. 100 % b. 80 orang	128.270.679	a. 100 % b. 96 orang	132.118.800	a. 100 % b. 96 orang	136.082.364	a. 100 % b. 120 orang	140.164.834
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Candi	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan dan di Anggarkan ke Candi Dilaksanakan Dengan Baik	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian c. Prosentase desa yang sudah mengisi dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai ketentuan d. Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.766.558.240**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.819.554.987**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.874.141.637**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.930.365.886**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.988.276.862**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
				Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian	**100%**	**1.043.532.780**	**100%**	**1.074.838.763**	**100%**	**1.107.083.926**	**100%**	**1.140.296.444**	**100%**	**1.174.505.337**
					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	a. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang kesos, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti b. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti c. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti d. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.043.532.780	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.074.838.763	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.107.083.926	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.140.296.444	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.174.505.337
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**723.025.460**	**100%**	**744.716.224**	**95%**	**767.057.711**	**95%**	**790.069.442**	**100%**	**813.771.525**
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis	50 buah	12.338.440	52 buah	12.708.593	70 buah	13.089.851	70 buah	13.482.547	75 buah	13.887.023

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	a. Jumlah Monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya b. Jumlah Monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya c. Jumlah Monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya d. Jumlah monev bidang perekonomian yang telah disusun laporanya e. Jumlah monev bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang telah disusun laporannya	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	7.754.548	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	7.987.184	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	8.226.800	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	8.473.604	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	8.727.812
					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	a. Jumlah pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang dilaksanakan b. Jumlah pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan c. Prosentase jumlah IUMK usaha mikro yang diterbitkan d. Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan	a. 4 kali b 2 kali c. 100% d. 60%	702.932.472	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 65 %	724.020.446	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 70 %	745.741.060	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 40 %	768.113.291	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 40 %	791.156.690
					PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang dibina c.persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**130.770.000**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**134.693.100**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**138.733.893**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**142.895.910**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**147.182.787**
					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang dibina**	**a.100% b. 50%**	**110.032.500**	**a.100% b. 50%**	**113.333.475**	**a.100% b. 50%**	**116.733.479**	**a.100% b. 50%**	**120.235.484**	**a.100% b. 50%**	**123.842.548**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	24 kali	11.700.000	24 kali	12.051.000	24 kali	12.412.530	24 kali	12.784.906	24 kali	13.168.453
					Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	4 kali	98.332.500	4 kali	101.282.475	4 kali	104.320.949	4 kali	107.450.578	4 kali	110.674.095
					Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase temuan pelanggaran perda, Perkada dan konflik yang ditindaklanjuti**	**100%**	**20.737.500**	**100%**	**21.359.625**	**100%**	**22.000.414**	**100%**	**22.660.426**	**100%**	**23.340.239**
					Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinyan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah temuan konflik sosial yang ditindaklanjuti b. Jumlah temuan pelanggaran perda dan perkada yang ditindaklanjuti	a. 1 temuan b. 5 temuan	20.737.500	a. 1 temuan b. 5 temuan	21.359.625	a. 8 temuan b. 4 temuan	22.000.414	a. 6 temuan b. 3 temuan	22.660.426	a. 6 temuan b. 3 temuan	23.340.239
					PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik**	**100%**	**38.912.000**	**100%**	**220.079.360**	**100%**	**226.681.741**	**100%**	**233.482.193**	**100%**	**240.486.659**
					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Acara yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari besar nasional**	**1 kali**	**38.912.000**	**1 kali**	**220.079.360**	**1 kali**	**226.681.741**	**1 kali**	**233.482.193**	**1 kali**	**240.486.659**
					Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia	a. Jumlah lomba-lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar Nasional b. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan c. Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan untuk Paskibraka	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	38.912.000	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	40.079.360	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	41.281.741	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	42.520.193	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	43.795.799
					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilakukan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000	1 kegiatan	32.781.810
					Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang diadakan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000	1 kegiatan	32.781.810

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan yang diadakan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000	1 kegiatan	32.781.810
					Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000	1 kegiatan	32.781.810
					Pengembangan Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan Pengembangan Berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000	1 kegiatan	32.781.810
					Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	0		2 kegiatan	30.000.000	2 kegiatan	30.900.000	2 kegiatan	31.827.000	2 kegiatan	32.781.810
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**71.735.700**	**100%**	**73.887.771**	**100%**	**76.104.404**	**100%**	**78.387.536**	**100%**	**80.739.162**
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**71.735.700**	**100%**	**73.887.771**	**100%**	**76.104.404**	**100%**	**78.387.536**	**100%**	**80.739.162**
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa Perubahan yang telah dievaluasi	a. 24 Desa b. 24 Desa	7.468.200	a. 24 Desa b. 24 Desa	7.692.246	a. 24 Desa b. 24 Desa	7.923.013	a. 24 Desa b. 24 Desa	8.160.704	a. 24 Desa b. 24 Desa	8.405.525
					Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	3 kali	64.267.500	3 kali	66.195.525	4 kali	68.181.391	4 kali	70.226.832	4 kali	72.333.637
			-	-	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan**	**90**	**5.797.739.607**	**90**	**7.382.870.410**	**95**	**7.629.356.523**	**95**	**7.858.237.218**	**100**	**8.093.984.335**
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan	**4 Tahapan**	**14.338.736**	**4 Tahapan**	**14.768.898**	**4 Tahapan**	**15.211.965**	**4 Tahapan**	**15.668.324**	**4 Tahapan**	**16.138.374**
						Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang disusun	4 kali (monev tribulan)		4 kali		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun	
					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen (renja, renja perubahan)	12.113.975	2 dokumen	12.477.394	3 dokumen (renja, renja perubahan, renstra)	12.851.716	2 dokumen	13.237.268	2 dokumen	13.634.386

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	391.094	1 dokumen	402.827	1 dokumen	414.912	1 dokumen	427.359	1 dokumen	440.180
					Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPDyang disusun tepat waktu	1 dokumen	215.996	1 dokumen	222.476	1 dokumen	229.150	1 dokumen	236.025	1 dokumen	243.105
					Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	454.696	1 dokumen	468.337	1 dokumen	482.387	1 dokumen	496.859	1 dokumen	511.764
					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	409.200	1 dokumen	421.476	1 dokumen	434.120	1 dokumen	447.144	1 dokumen	460.558
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja PD yang disusun tepat waktu	3 dokumen	424.325	3 dokumen	437.055	3 dokumen	450.166	3 dokumen	463.671	3 dokumen	477.582
					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 dokumen	329.450	4 dokumen	339.334	4 dokumen	349.514	4 dokumen	359.999	4 dokumen	370.799
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran PD**	**85%**	**4.222.910.125**	**86%**	**4.360.097.429**	**87%**	**4.490.900.352**	**88%**	**4.625.627.362**	**89%**	**4.764.396.183**
					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan	31 orang	4.206.324.699	35 orang	4.332.514.440	35 orang	4.462.489.873	35 orang	4.596.364.569	35 orang	4.734.255.506
					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	500 buah	14.885.750	500 buah	15.332.323	500 buah	15.792.292	525 buah	16.266.061	550 buah	16.754.043
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah SPM yang diterbitkan	0		60 SPM	2.500.000	60 SPM	2.575.000	75 SPM	2.652.250	75 SPM	2.731.818
					Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Akuntansi Keuangan PD yang disusun	0		12 Laporan	3.750.000	12 Laporan	3.862.500	12 Laporan	3.978.375	12 Laporan	4.097.726
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	413.050	1 Laporan	425.442	1 Laporan	438.205	1 Laporan	451.351	1 Laporan	464.891
					Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Disusun	0		3 Laporan	2.750.000	3 Laporan	2.832.500	3 Laporan	2.917.475	3 Laporan	3.004.999
					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	14 laporan	1.286.626	14 laporan	1.325.225	14 laporan	1.364.982	14 laporan	1.405.931	14 laporan	1.448.109
					Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang Tersusun	0		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.545.000	1 Laporan	1.591.350	1 Laporan	1.639.091
						Persentase BMD SKPD yang telah Teregistrasi	**75%**	**3.839.396**	**80%**	**394.903.193**	**80%**	**406.750.289**	**85%**	**418.952.797**	**85%**	**431.521.381**

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD SKPD yang telah Tersertifikasi**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
					Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	2 laporan	159.896	2 laporan	164.693	2 laporan	169.634	2 laporan	174.723	2 laporan	179.964
					Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD SKPD yang telah Teregistrasi	0		50 unit	1.500.000	50 unit	1.545.000	100 unit	1.591.350	100 unit	1.639.091
						Jumlah BMD SKPD yang telah Tersertifikasi	0		1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0
					Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	0		2 kali	2.500.000		2.575.000		2.652.250		2.731.818
					Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD SKPD yang Dilakukan	0		4 kali	5.000.000	4 kali	5.150.000	4 kali	5.304.500	4 kali	5.463.635
					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD SKPD yang Dilakukan	0		4 kali	5.000.000	4 kali	5.150.000	4 kali	5.304.500	4 kali	5.463.635
						Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun			4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0	4 Laporan	0
					Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	7 laporan	3.679.500	7 laporan	378.988.500	7 laporan	390.358.155	7 laporan	402.068.900	7 laporan	414.130.967
					Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	0		30 unit	1.750.000	40 unit	1.802.500	50 unit	1.856.575	60 unit	1.912.272
						Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	0		50 unit		60 unit	0	70 unit	0	80 unit	0
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**85**	**350.372.332**	**85**	**395.883.502**	**86**	**407.760.007**	**86**	**419.992.807**	**87**	**432.592.591**
					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	110 buah	4.353.800	110 buah	4.484.414	110 buah	4.618.946	150 buah	4.757.515	160 buah	4.900.240
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	0		5 unit	35.000.000	6 unit	36.050.000	7 unit	37.131.500	8 unit	38.245.445
					Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	185 buah	9.160.261	200 buah	9.435.069	215 buah	9.718.121	185 buah	10.009.665	185 buah	10.309.954
					Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah logistik rumah tangga yang tersedia	1 tahun 1 tahun	155.000.000	1 tahun 1 tahun	159.650.000	1 tahun 1 tahun	164.439.500	1 tahun 1 tahun	169.372.685	1 tahun 1 tahun	174.453.866
					Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	5.583.600	1 tahun	5.751.108	1 tahun	5.923.641	1 tahun	6.101.350	1 tahun	6.284.391

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang- undangan dan koran yang tersedia	24 exsemplar	2.244.000	24 exsemplar	2.311.320	24 exsemplar	2.380.660	24 exsemplar	2.452.079	24 exsemplar	2.525.642
					Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	1 tahun	1.571.724	1 tahun	1.618.876	1 tahun	1.667.442	1 tahun	1.717.465	1 tahun	1.768.989
					Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	1 tahun	51.850.000	1 tahun	53.405.500	1 tahun	55.007.665	1 tahun	56.657.895	1 tahun	58.357.632
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan Prosentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	1 tahun 100 %	106.073.019	1 tahun 100 %	109.255.210	1 tahun 100 %	112.532.866	1 tahun 100 %	115.908.852	1 tahun 100 %	119.386.117
					Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	18 arsip	10.685.928	18 arsip	11.006.506	18 arsip	11.336.701	18 arsip	11.676.802	18 arsip	12.027.106
					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Data dan informasi PD yang tersedia	1 tahun	3.850.000	1 tahun	3.965.500	1 tahun	4.084.465	1 tahun	4.206.999	1 tahun	4.333.209
					Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Retribusi Perangkat Daerah terhadap Target yang Telah Ditetapkan**	**0**	**0**	**80%**	**84.750.000**	**80%**	**87.292.500**	**85%**	**89.911.275**	**85%**	**92.608.613**
					Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi Atas Retribusi Daerah yang Disusun	0		40 pemohon	5.000.000	50 pemohon	5.150.000	60 pemohon	5.304.500	70 pemohon	5.463.635
					Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan Retribusi Daerah yang Ditetapkan	0		0	2.500.000	0	2.575.000	0	2.652.250	0	2.731.818
						Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah yang Disusun	0		0		0	0	0	0	0	0
					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan Retribusi Daerah yang Dilakukan	0		1 kali	25.000.000	1 kali	25.750.000	1 kali	26.522.500	1 kali	27.318.175
						Jumlah Publikasi Kebijakan Retribusi Daerah yang Dipublikasikan	0		4 kali		4 kali	0	4 kali	0	4 kali	0
					Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0		1 kali	7.500.000	1 kali	7.725.000	1 kali	7.956.750	1 kali	8.195.453
					Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah yang Diolah	0		1 Data	15.000.000	1 Data	15.450.000	1 Data	15.913.500	1 Data	16.390.905
					Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi Daerah yang Ditetapkan	0		1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.750.000	1 Laporan	26.522.500	1 Laporan	27.318.175

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Disusun	0		1 Laporan	4.750.000	1 Laporan	4.892.500	1 Laporan	5.039.275	1 Laporan	5.190.453
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang Disiplin**	**80%**	**1.995.818**	**85%**	**2.055.693**	**85%**	**2.117.363**	**90%**	**2.180.884**	**90%**	**2.246.311**
						Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan yang Bersertifikat	**50%**		**50%**		**75%**		**75%**		**80%**	
					Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	31 buah	1.456.730	35 buah	1.500.432	35 buah	1.545.445	35 buah	1.591.808	35 buah	1.639.562
						Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	31 buah		35 buah		35 buah		35 buah		35 buah	
					Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai perangkat daerah yang dilakukan	31 orang	539.088	31 orang	555.261	31 orang	571.918	31 orang	589.076	31 orang	606.748
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan**	**0**		**21 unit**	**775.000.000**	**32 unit**	**798.250.000**	**43 unit**	**822.197.500**	**55 unit**	**846.863.425**
					Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	0		-	0	1 unit	0	1 unit	0	1 unit	0
					Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Diadakan	0		2 unit	60.000.000	1 unit	61.800.000	1 unit	63.654.000	2 unit	65.563.620
					Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	0		1 unit	30.000.000	1 unit	30.900.000	1 unit	31.827.000	1 unit	32.781.810
					Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	0		1 unit	250.000.000	1 unit	257.500.000	1 unit	265.225.000	1 unit	273.181.750
					Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang Diadakan	0		5 unit	50.000.000	10 unit	51.500.000	15 unit	53.045.000	20 unit	54.636.350
					Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung/ Kantor/ Rumah Dinas/ Jabatan yang Diadakan	0		3 unit	60.000.000	4 unit	61.800.000	5 unit	63.654.000	6 unit	65.563.620
					Pengadaan Aset tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	0		5 unit	50.000.000	10 unit	51.500.000	15 unit	53.045.000	20 unit	54.636.350
					Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	0		1 paket	50.000.000	1 paket	51.500.000	1 paket	53.045.000	1 paket	54.636.350
					Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	0		1 paket	70.000.000	1 paket	72.100.000	1 paket	74.263.000	1 paket	76.490.890
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	0		1 paket	80.000.000	1 paket	82.400.000	1 paket	84.872.000	1 paket	87.418.160

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		1 paket	75.000.000	1 paket	77.250.000	1 paket	79.567.500	1 paket	81.954.525
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran**	**90%**	**793.783.200**	**90%**	**842.596.696**	**95%**	**867.874.597**	**95%**	**893.910.835**	**100%**	**920.728.160**
					Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang Dikelola	5.000 surat		5.000 surat	5.000.000	5.500 surat	5.150.000	5.500 surat	5.304.500	6.000 surat	5.463.635
					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	1 tahun	107.600.000	1 tahun	110.828.000	1 tahun	114.152.840	1 tahun	117.577.425	1 tahun	121.104.748
					Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Berfungsi Baik	0		50%	20.000.000	50%	20.600.000	75%	21.218.000	75%	21.854.540
					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang Terbayar	a. 3 orang	686.183.200	a. 3 orang	706.768.696	a. 3 orang	727.971.757	a. 3 orang	749.810.910	a. 3 orang	772.305.237
						Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang Terbayar	b. 2 orang		b. 2 orang		b. 2 orang		b. 2 orang		b. 2 orang	
						Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang yang Terbayar	c. 10 orang		c. 10 orang		c. 10 orang		c. 10 orang		c. 10 orang	
						Jumlah Tenaga Non ASN yang Terbayar	d. 14 orang		d. 14 orang		d. 14 orang		d. 14 orang		d. 14 orang	
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan**	**1 tahun**	**410.500.000**	**1 tahun**	**512.815.000**	**1 tahun**	**553.199.450**	**1 tahun**	**569.795.434**	**1 tahun**	**586.889.297**
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara; b. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	30.000.000	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	30.900.000	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	31.827.000	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	32.781.810	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	33.765.264
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	1 unit R3 3 unit R4	36.000.000	1 unit R3 3 unit R4	37.080.000	1 unit R3 3 unit R4	38.192.400	1 unit R3 3 unit R4	39.338.172	1 unit R3 3 unit R4	40.518.317
						Jumlah Bahan Peralatan dan Bahan Pembersih Kendaraan yang Tersedia	0		0		0		0		0	
						Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang Lunas Pajaknya	1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		1 R3 3 R4	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	0		-	0	1 unit	25.000.000	1 unit	25.750.000	1 unit	26.522.500

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Sasaran PD	Indikator Sasaran	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									
							Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026	
1					18	19	21		22		23		24		25	
					Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Diurus Perijinannya	0		-		1 unit		1 unit		1 unit	
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara	0		-	0	-	0	-	0	-	0
						Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diurus Perijinannya	0		-		-	0	-	0	-	0
					Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.600.000	1 tahun	21.218.000	1 tahun	21.854.540		22.510.176
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 tahun	79.000.000	1 tahun	81.370.000	1 tahun	83.811.100	1 tahun	86.325.433		88.915.196
					Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0		1 unit	15.000.000	1 unit	15.450.000	1 unit	15.913.500	1 unit	16.390.905
					Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0		1 paket	25.000.000	1 paket	25.750.000	1 paket	26.522.500	1 paket	27.318.175
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor /rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	400 m2	50.000.000	400 m2	51.500.000	400 m2	53.045.000	400 m2	54.636.350	400 m2	56.275.441
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	8 unit	162.000.000	8 unit	166.860.000	8 unit	171.865.800	8 unit	177.021.774	8 unit	182.332.427
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 unit	33.500.000	1 unit	34.505.000	1 unit	35.540.150	1 unit	36.606.355	1 unit	37.704.545
					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang Dipelihara/Rehabilitasi	0		1 unit	50.000.000	1 unit	51.500.000	1 unit	53.045.000	1 unit	54.636.350

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 INDIKATOR KINERJA KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Penetapan indikator kinerja sebagai ukuran kinerja OPD yang akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan dari suatu organisasi pengukuran kinerja organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat, tepat serta akurat jika dilakukan dengan penetapan indikator kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja tersebut sebagai syarat penting untuk menetapkan rencana strategis sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Organisasi. Misi dari pembangunan jangka menengah Kabupaten Sidoarjo dan sinergi dengan fungsi tugas dari Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo adalah dari misi pertama yakni **"Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha"**. Dengan Tujuan RPJMD yakni **"Meningkatnya Tata Kelola Pemeritahan yang Bersih, Transparan, dan Tangkas Berbasis Digital serta Pelayanan Publik Berkualitas yang Mendukung Kemudahan Berusaha"**.

Indikator kinerja adalah uraian berupa ringkasan dengan menggunakan ukuran kualitatif dan kuantitatif yang untuk pencapaian suatu tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Tujuan Renstra Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 yaitu **"Pertama, Meningkatnya kualitas pelayanan kecamatan; Kedua, Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan"** Kegunaan dari indikator kinerja lebih kepada dasar penilaian kinerja dan sebagai petunjuk atas kemajuan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo
yang Mengacu pada Sasaran RPJMD

Sasaran RPJMD: **1. Terselenggaranya tata Kelola Pemerintahan yang bersih, transparan dan tangkas berbasis** **2. Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dalam rangka mendukung kemudahan berusaha**					
Indikator Tujuan/Sasaran	**Target capaian kinerja**				
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Tujuan 1: Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan					
Nilai SKM	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93
Tujuan 2: Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan					
Nilai SAKIP Kecamatan Candi	BB	BB	BB	BB	A
Sasaran 1: Meningkatnya kualitas pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan					
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93
Sasaran 2: Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan dan di Anggarkan ke Candi Dilaksanakan Dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	90,90%	91,30%	95,65%	100%	100%

Tabel 7.2

Formulasi Perhitungan Indikator Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Tujuan Kecamatan Candi	Indikator Tujuan	Formulasi Tujuan	Sasaran Kecamatan Candi	Indikator Sasaran	Formulasi Sasaran
Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan	Nilai SKM Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey SKM Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang dilakukan oleh lembaga yang berkompeten
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP Kecamatan Candi	Nilai SAKIP	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan dan di Anggarkan ke Candi Dilaksanakan Dengan Baik	Jumlah urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang Didelegasikan ke Kecamatan Candi Dilaksanakan Dengan Baik ---------- x100% Jumlah urusan pemerintahan umum dan kewenangan lainnya yang dianggarkan
				Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	Jumlah Desa Kategori Maju ----------x100% Jumlah Desa maju dan berkembang Kecamatan Candi

BAB VIII
PENUTUP

Rancangan Rencana Strategis Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021- 2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Kecamatan Candi dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholders yang ada. Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo 2021-2026. Pelaksanaan Rencana Strategis ini sangat memerlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Kecamatan Candi, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun.

Dengan demikian Rencana Strategis ini merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders sesuai dengan visi dan misi daerah yang ingin dicapai. Akhir kata semoga Rencana Strategis Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* melalui rencana tahunan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Candi.

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
1			4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17	18	19	21		22		23		24		25		26		27	28
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Kinerja Pelayanan Publik Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan	85,43	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	85,43	85,53	85,63	85,73	85,83	85,93	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian c. Prosentase desa yang sudah mengisi dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai ketentuan d. Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**124.534.640**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**128.270.679**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**132.118.800**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**136.082.364**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**140.164.834**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**140.164.834**	**Kecamatan Candi**	
																	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	**Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP**	**100%**	**124.534.640**	**100%**	**128.270.679**	**100%**	**132.118.800**	**100%**	**136.082.364**	**100%**	**140.164.834**	**100%**	**140.164.834**	**Kecamatan Candi**	
																	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	a. persentase pelayanan umum yang telah diselesaikan b. Jumlah peserta sosialisasi pelayanan umum	a. 100 % b. 80 orang	124.534.640	a. 100 % b. 80 orang	128.270.679	a. 100 % b. 96 orang	132.118.800	a. 100 % b. 96 orang	136.082.364	a. 100 % b. 120 orang	140.164.834	a. 100 % b. 120 orang	140.164.834,47	Kecamatan Candi	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Kecamatan Candi	74,33 BB	BB (70-80)	BB	BB	BB	A	Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dan Kewenangan Lainnya Yang Didelegasikan dan di Anggarkan ke Candi Dilaksanakan Dengan Baik	58,16	100%	100%	100%	100%	100%	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP b. prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian c. Prosentase desa yang sudah mengisi dokumen pemutakhiran data Indeks Desa Membangun (IDM) sesuai ketentuan d. Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.766.558.240**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.819.554.987**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.874.141.637**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.930.365.886**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.988.276.862**	**a. 100% b. 100% c. 100% d. 100%**	**1.988.276.862**	**Kecamatan Candi**	
										Persentase Desa Maju di Kecamatan Candi	70,83 17 desa	20 desa 90,90%	21 desa 91,30%	22 desa 95,65%	23 desa 100%	23 desa 100%	**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian	**100%**	**1.043.532.780**	**100%**	**1.074.838.763**	**100%**	**1.107.083.926**	**100%**	**1.140.296.444**	**100%**	**1.174.505.337**	**100%**	**1.174.505.337**	**Kecamatan Candi**	
																	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal	a. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang kesos, agama dan kemasyarakatan yang ditindaklanjuti b. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pembangunan dan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti c. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti d. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.043.532.780	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.074.838.763	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.107.083.926	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.140.296.444	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.174.505.337	a. 24 kali b. 24 kali c. 24 kali d. 24 kali	1.174.505.337	**Kecamatan Candi**	
																	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	**Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat**	**100%**	**723.025.460**	**100%**	**744.716.224**	**95%**	**767.057.711**	**95%**	**790.069.442**	**100%**	**813.771.525**	**100%**	**813.771.525**	**Kecamatan Candi**	
																	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang telah diberi saran teknis	50 buah	12.338.440	52 buah	12.708.593	70 buah	13.089.851	70 buah	13.482.547	75 buah	13.887.023	75 buah	13.887.023	Kecamatan Candi	
																	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	a. Jumlah Monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan yang telah disusun laporannya b. Jumlah Monev bidang pembangunan dan lingkungan yang telah disusun laporannya c. Jumlah Monev bidang pemerintahan yang telah disusun laporannya d. Jumlah monev bidang perekonomian yang telah disusun laporanya e. Jumlah monev bidang ketentraman dan ketertiban umum yang telah disusun laporannya	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	7.754.548	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	7.987.184	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	8.226.800	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	8.473.604	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	8.727.812	a. 1 laporan b. 1 laporan c. 1 laporan	8.727.812	Kecamatan Candi	
																	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	a. Jumlah pembinaan tentang lingkungan hidup dan penanganan sampah domestik yang dilaksanakan b. Jumlah pembinaan usaha ekonomi masyarakat yang dilaksanakan c. Prosentase jumlah IUMK usaha mikro yang diterbitkan d. Prosentase pedagang kaki lima yang telah mengikuti pembinaan	a. 4 kali b 2 kali c. 100% d. 60%	702.932.472	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 65 %	724.020.446	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 70 %	745.741.060	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 40 %	768.113.291	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 40 %	791.156.690	a. 4 kali b 2 kali c. 100 % d. 40 %	791.156.690	Kecamatan Candi	
																	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	**a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang dibina c.persentase temuan pelanggaran perda dan konflik yang ditangani**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**130.770.000**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**134.693.100**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**138.733.893**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**142.895.910**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**147.182.787**	**a. 100% b. 100% c. 100%**	**147.182.787**	**Kecamatan Candi**	
																	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	**a. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditinjaklanjuti b. prosentase lembaga sosial, agama, dan kemasyarakatan yang dibina**	**a.100% b. 50%**	**110.032.500**	**a.100% b. 50%**	**113.333.475**	**a.100% b. 50%**	**116.733.479**	**a.100% b. 50%**	**120.235.484**	**a.100% b. 50%**	**123.842.548**	**a.100% b. 50%**	**123.842.548**	**Kecamatan Candi**	
																	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di	Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti	24 kali	11.700.000	24 kali	12.051.000	24 kali	12.412.530	24 kali	12.784.906	24 kali	13.168.453	24 kali	13.168.453,08	Kecamatan Candi	
																	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang dilaksanakan	4 kali	98.332.500	4 kali	101.282.475	4 kali	104.320.949	4 kali	107.450.578	4 kali	110.674.095	4 kali	110.674.095,06	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	**Persentase temuan pelanggaran perda, Perkada dan konflik yang ditindaklanjuti**	**100%**	**20.737.500**	**100%**	**21.359.625**	**100%**	**22.000.414**	**100%**	**22.660.426**	**100%**	**23.340.239**	**100%**	**23.340.239**	**Kecamatan Candi**	
																	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinyan di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	a. Jumlah temuan konflik sosial yang ditindaklanjuti b. Jumlah temuan pelanggaran perda dan perkada yang ditindaklanjuti	a. 1 temuan b. 5 temuan	20.737.500	a. 1 temuan b. 5 temuan	21.359.625	a. 8 temuan b. 4 temuan	22.000.414	a. 6 temuan b. 3 temuan	22.660.426	a. 6 temuan b. 3 temuan	23.340.239	a. 6 temuan b. 3 temuan	23.340.239	Kecamatan Candi	
																	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	**Prosentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dilaksanakan dengan baik**	**100%**	**38.912.000**	**100%**	**220.079.360**	**100%**	**226.681.741**	**100%**	**233.482.193**	**100%**	**240.486.659**	**100%**	**240.486.659**	**Kecamatan Candi**	
																	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	**Jumlah Acara yang dilaksanakan dalam rangka Peringatan Hari besar nasional**	**1 kali**	**38.912.000**	**1 kali**	**220.079.360**	**1 kali**	**226.681.741**	**1 kali**	**233.482.193**	**1 kali**	**240.486.659**	**1 kali**	**240.486.659**	**Kecamatan Candi**	
																	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Repulik Indonesia	a. Jumlah lomba- lomba yang dilaksanakan untuk memperingati Hari Besar Nasional b. Jumlah upacara hari besar nasional yang dilaksanakan c. Jumlah pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilaksanakan untuk Paskibraka	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	38.912.000	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	40.079.360	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	41.281.741	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	42.520.193,02	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	43.795.798,81	a. 5 kegiatan b. 2 kegiatan	43.795.798,81	**Kecamatan Candi**	

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
1			4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17	18	19	21		22		23		24		25		26		27	28
																	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional yang dilakukan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000,00	1 kegiatan	32.781.810,00	**1 kegiatan**	32.781.810,00	**Kecamatan Candi**	
																	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang diadakan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000,00	1 kegiatan	32.781.810,00	**1 kegiatan**	32.781.810,00	**Kecamatan Candi**	
																	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional,	Jumlah Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan yang diadakan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000,00	1 kegiatan	32.781.810,00	**1 kegiatan**	32.781.810,00	**Kecamatan Candi**	
																	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Konflik Sosial yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000,00	1 kegiatan	32.781.810,00	**1 kegiatan**	32.781.810,00	**Kecamatan Candi**	
																	Pengembangan Berdasarkan Pancasila	Jumlah kegiatan Pengembangan Berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan	0		1 kegiatan	30.000.000	1 kegiatan	30.900.000	1 kegiatan	31.827.000,00	1 kegiatan	32.781.810,00	**1 kegiatan**	32.781.810,00	**Kecamatan Candi**	
																	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan yang dilaksanakan	0		2 kegiatan	30.000.000	2 kegiatan	30.900.000	2 kegiatan	31.827.000,00	2 kegiatan	32.781.810,00	**2 kegiatan**	32.781.810,00	**Kecamatan Candi**	
																	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase desa yang menyusun sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**71.735.700**	**100%**	**73.887.771**	**100%**	**76.104.404**	**100%**	**78.387.536**	**100%**	**80.739.162**	**100%**	**80.739.162**	**Kecamatan Candi**	
																	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	**Prosentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu**	**100%**	**71.735.700**	**100%**	**73.887.771**	**100%**	**76.104.404**	**100%**	**78.387.536**	**100%**	**80.739.162**	**100%**	**80.739.162**	**Kecamatan Candi**	
																	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	a. Jumlah APBDesa yang telah dievaluasi b. Jumlah APBDesa Perubahan yang telah dievaluasi	a. 24 Desa b. 24 Desa	7.468.200	a. 24 Desa b. 24 Desa	7.692.246	a. 24 Desa b. 24 Desa	7.923.013	a. 24 Desa b. 24 Desa	8.160.704	a. 24 Desa b. 24 Desa	8.405.525	**a. 24 Desa b. 24 Desa**	8.405.525	**Kecamatan Candi**	
																	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah pembinaan tentang perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang dilaksanakan	3 kali	64.267.500	3 kali	66.195.525	4 kali	68.181.391	4 kali	70.226.832	4 kali	72.333.637	**4 kali**	72.333.637	**Kecamatan Candi**	
																	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan kesekretariatan**	**90**	**5.797.739.607**	**90**	**7.382.870.410**	**95**	**7.629.356.523**	**95**	**7.858.237.218**	**100**	**8.093.984.335**	**100**	**8.093.984.335**	**Kecamatan Candi**	
																	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Tahapan Perencanaan yang Dilaksanakan	**4 Tahapan**	**14.338.736**	**4 Tahapan**	**14.768.898**	**4 Tahapan**	**15.211.965**	**4 Tahapan**	**15.668.324**	**4 Tahapan**	**16.138.374**	4 Tahapan	16.138.374	Kecamatan Candi	
																		Jumlah Rekomendasi Hasil Evaluasi Kinerja yang disusun	4 kali (monev tribulan)		4 kali		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		1 Tahun		Kecamatan Candi	
																	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang disusun tepat waktu	2 dokumen (renja, renja perubahan)	12.113.975	2 dokumen	12.477.394	3 dokumen (renja, renja perubahan, renstra)	12.851.716	2 dokumen	13.237.268	2 dokumen	13.634.386	2 dokumen	13.634.386	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	391.094	1 dokumen	402.827	1 dokumen	414.912	1 dokumen	427.359	1 dokumen	440.180	1 dokumen	440.180	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	jumlah dokumen Perubahan RKA- SKPDyang disusun tepat waktu	1 dokumen	215.996	1 dokumen	222.476	1 dokumen	229.150	1 dokumen	236.025	1 dokumen	243.105	1 dokumen	243.105	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	454.696	1 dokumen	468.337	1 dokumen	482.387	1 dokumen	496.859	1 dokumen	511.764	1 dokumen	511.764	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD yang disusun tepat waktu	1 dokumen	409.200	1 dokumen	421.476	1 dokumen	434.120	1 dokumen	447.144	1 dokumen	460.558	1 dokumen	460.558	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja PD yang disusun tepat waktu	3 dokumen	424.325	3 dokumen	437.055	3 dokumen	450.166	3 dokumen	463.671	3 dokumen	477.582	3 dokumen	477.582	Kecamatan Candi	
																	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen monev PD yang tersusun	4 dokumen	329.450	4 dokumen	339.334	4 dokumen	349.514	4 dokumen	359.999	4 dokumen	370.799	4 dokumen	370.799	Kecamatan Candi	
																	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Anggaran PD**	**85%**	**4.222.910.125**	**86%**	**4.360.097.429**	**87%**	**4.490.900.352**	**88%**	**4.625.627.362**	**89%**	**4.764.396.183**	**89%**	**4.764.396.183**	**Kecamatan Candi**	
																	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapat gaji dan Tunjangan	31 orang	4.206.324.699	35 orang	4.332.514.440	35 orang	4.462.489.873	35 orang	4.596.364.569	35 orang	4.734.255.506	35 orang	4.734.255.506	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Alat Tulis Kantor yang tersedia	500 buah	14.885.750	500 buah	15.332.323	500 buah	15.792.292	525 buah	16.266.061	550 buah	16.754.043	550 buah	16.754.043	Kecamatan Candi	
																	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi	Jumlah SPM yang diterbitkan	0		60 SPM	2.500.000	60 SPM	2.575.000	75 SPM	2.652.250	75 SPM	2.731.818	75 SPM	2.731.818	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Akuntansi Keuangan PD yang disusun	0		12 Laporan	3.750.000	12 Laporan	3.862.500	12 Laporan	3.978.375	12 Laporan	4.097.726	12 Laporan	4.097.726	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun	1 Laporan	413.050	1 Laporan	425.442	1 Laporan	438.205	1 Laporan	451.351	1 Laporan	464.891	1 Laporan	464.891	Kecamatan Candi	
																	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Disusun	0		3 Laporan	2.750.000	3 Laporan	2.832.500	3 Laporan	2.917.475	3 Laporan	3.004.999	3 Laporan	3.004.999	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan keuangan Bulanan/Semesteran PD yang tersusun	14 laporan	1.286.626	14 laporan	1.325.225	14 laporan	1.364.982	14 laporan	1.405.931	14 laporan	1.448.109	14 laporan	1.448.109	Kecamatan Candi	
																	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis Realisasi Anggaran yang Tersusun	0		1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.545.000	1 Laporan	1.591.350	1 Laporan	1.639.091	1 Laporan	1.639.091	Kecamatan Candi	
																	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	**Persentase BMD SKPD yang telah Teregistrasi**	**75%**	**3.839.396,00**	**80%**	**394.903.192,88**	**80%**	**406.750.288,67**	**85%**	**418.952.797,33**	**85%**	**431.521.381,25**	**85%**	**431.521.381**	**Kecamatan**	
																		Persentase BMD SKPD yang telah Tersertifikasi			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**Kecamatan Candi**	
																	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah laporan RKBMD yang disusun	2 laporan	159.896	2 laporan	164.693	2 laporan	169.634	2 laporan	174.723	2 laporan	179.964	2 laporan	179.964	Kecamatan Candi	
																	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah BMD SKPD yang telah Teregistrasi	0		50 unit	1.500.000	50 unit	1.545.000	100 unit	1.591.350	100 unit	1.639.091	100 unit	1.639.091	Kecamatan Candi	
																		Jumlah BMD SKPD yang telah Tersertifikasi	0		1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	Kecamatan Candi	
																	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah BMD SKPD yang dilakukan penilaian	0		2 kali	2.500.000		2.575.000		2.652.250		2.731.818	0%	2.731.818	Kecamatan Candi	
																	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian BMD SKPD yang Dilakukan	0		4 kali	5.000.000	4 kali	5.150.000	4 kali	5.304.500	4 kali	5.463.635	4 kali	5.463.635	Kecamatan Candi	
																	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Rekonsiliasi BMD SKPD yang Dilakukan	0		4 kali	5.000.000	4 kali	5.150.000	4 kali	5.304.500	4 kali	5.463.635	4 kali	5.463.635	Kecamatan Candi	
																		Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun			4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	4 Laporan	-	Kecamatan Candi	

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
1			4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17	18	19	21		22		23		24		25		26		27	28
																	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan BMD SKPD yang disusun tepat waktu	7 laporan	3.679.500	7 laporan	378.988.500	7 laporan	390.358.155	7 laporan	402.068.900	7 laporan	414.130.967	7 laporan	414.130.967	Kecamatan Candi	
																	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik	0		30 unit	1.750.000	40 unit	1.802.500	50 unit	1.856.575	60 unit	1.912.272	60 unit	1.912.272	Kecamatan Candi	
																		Jumlah BMD SKPD yang dimanfaatkan	0		50 unit		60 unit	-	70 unit	-	80 unit	-	80 unit	-	Kecamatan Candi	
																	Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)**	**85**	**350.372.332**	**85**	**395.883.502**	**86**	**407.760.007**	**86**	**419.992.807**	**87**	**432.592.591**	**8700%**	**432.592.591**	**Kecamatan Candi**	
																	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik/penerangan yang tersedia	110 buah	4.353.800	110 buah	4.484.414	110 buah	4.618.946	150 buah	4.757.515	160 buah	4.900.240	160 buah	4.900.240	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Tersedia	0		5 unit	35.000.000	6 unit	36.050.000	7 unit	37.131.500	8 unit	38.245.445	8 unit	38.245.445	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang tersedia	185 buah	9.160.261	200 buah	9.435.069	215 buah	9.718.121	185 buah	10.009.665	185 buah	10.309.954	185 buah	10.309.954	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah BBM yang disediakan Jumlah logistik rumah tangga yang tersedia	1 tahun 1 tahun	155.000.000	1 tahun 1 tahun	159.650.000	1 tahun 1 tahun	164.439.500	1 tahun 1 tahun	169.372.685	1 tahun 1 tahun	174.453.866	1 tahun 1 tahun	174.453.866	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan dan penggandaan yang tersedia	1 tahun	5.583.600	1 tahun	5.751.108	1 tahun	5.923.641	1 tahun	6.101.350	1 tahun	6.284.391	1 tahun	6.284.391	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku bahan bacaan, peraturan perundang- undangan dan koran yang tersedia	24 exsemplar	2.244.000	24 exsemplar	2.311.320	24 exsemplar	2.380.660	24 exsemplar	2.452.079	24 exsemplar	2.525.642	24 exsemplar	2.525.642	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah bahan/material yang tersedia	1 tahun	1.571.724	1 tahun	1.618.876	1 tahun	1.667.442	1 tahun	1.717.465	1 tahun	1.768.989	1 tahun	1.768.989	Kecamatan Candi	
																	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah jamuan rapat/tamu yang disediakan	1 tahun	51.850.000	1 tahun	53.405.500	1 tahun	55.007.665	1 tahun	56.657.895	1 tahun	58.357.632	1 tahun	58.357.632	Kecamatan Candi	
																	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan Prosentase surat perintah tugas yang ditindaklanjuti	1 tahun 100 %	106.073.019	1 tahun 100 %	109.255.210	1 tahun 100 %	112.532.866	1 tahun 100 %	115.908.852	1 tahun 100 %	119.386.117	1 tahun 100 %	119.386.117	Kecamatan Candi	
																	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang dikelola	18 arsip	10.685.928	18 arsip	11.006.506	18 arsip	11.336.701	18 arsip	11.676.802	18 arsip	12.027.106	**18 arsip**	12.027.106	**Kecamatan Candi**	
																	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Data dan informasi PD yang tersedia	1 tahun	3.850.000	1 tahun	3.965.500	1 tahun	4.084.465	1 tahun	4.206.999	1 tahun	4.333.209	1 tahun	4.333.209	Kecamatan Candi	
																	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	**Persentase Realisasi Retribusi Perangkat Daerah terhadap Target yang Telah Ditetapkan**	**0**	**-**	**80%**	**84.750.000**	**80%**	**87.292.500**	**85%**	**89.911.275**	**85%**	**92.608.613**	**85%**	**92.608.613**	**Kecamatan Candi**	
																	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Potensi Atas Retribusi Daerah yang Disusun	0		40 pemohon	5.000.000	50 pemohon	5.150.000	60 pemohon	5.304.500	70 pemohon	5.463.635	70 pemohon	5.463.635	Kecamatan Candi	
																	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Kebijakan Retribusi Daerah yang Ditetapkan	0		0	2.500.000	0	2.575.000	0	2.652.250	0	2.731.818	0%	2.731.818	Kecamatan Candi	
																		Jumlah Dokumen Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah yang Disusun	0		0		0	-	0	-	0	-	0%	-	Kecamatan Candi	
																	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Penyuluhan Retribusi Daerah yang Dilakukan	0		1 kali	25.000.000	1 kali	25.750.000	1 kali	26.522.500	1 kali	27.318.175	1 kali	27.318.175	Kecamatan Candi	
																		Jumlah Publikasi Kebijakan Retribusi Daerah yang Dipublikasikan	0		4 kali		4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	4 kali	-	Kecamatan Candi	
																	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	0		1 kali	7.500.000	1 kali	7.725.000	1 kali	7.956.750	1 kali	8.195.453	1 kali	8.195.453	Kecamatan Candi	
																	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Data Retribusi Daerah yang Diolah	0		1 Data	15.000.000	1 Data	15.450.000	1 Data	15.913.500	1 Data	16.390.905	1 Data	16.390.905	Kecamatan Candi	
																	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Wajib Retribusi Daerah yang Ditetapkan	0		1 Laporan	25.000.000	1 Laporan	25.750.000	1 Laporan	26.522.500	1 Laporan	27.318.175	1 Laporan	27.318.175	Kecamatan Candi	
																	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah yang Disusun	0		1 Laporan	4.750.000	1 Laporan	4.892.500	1 Laporan	5.039.275	1 Laporan	5.190.453	1 Laporan	5.190.453	Kecamatan Candi	
																	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Persentase ASN yang Disiplin**	**80%**	**1.995.818**	**85%**	**2.055.693**	**85%**	**2.117.363**	**90%**	**2.180.884**	**90%**	**2.246.311**	**90%**	**2.246.311**	**Kecamatan Candi**	
																		Persentase ASN yang Mengikuti Pelatihan yang Bersertifikat	**50%**		**50%**		**75%**		**75%**		**80%**		**80%**		**Kecamatan Candi**	
																	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah administrasi kepegawaian yang diolah	31 buah	1.456.730	35 buah	1.500.432	35 buah	1.545.445	35 buah	1.591.808	35 buah	1.639.562	35 buah	1.639.562	Kecamatan Candi	
																		Jumlah administrasi kepegawaian yang disusun	31 buah		35 buah		35 buah		35 buah		35 buah		35 buah			
																	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah monitoring, evaluasi dan penilaian kinerja pegawai perangkat daerah yang dilakukan	31 orang	539.088	31 orang	555.261	31 orang	571.918	31 orang	589.076	31 orang	606.748	31 orang	606.748	Kecamatan Candi	
																	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Jumlah dan Jenis BMD yang Diadakan**	**0**		**21 unit**	**775.000.000**	**32 unit**	**798.250.000**	**43 unit**	**822.197.500**	**55 unit**	**846.863.425**	**55 unit**	**846.863.425**	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang Diadakan	0		-	-	1 unit	-	1 unit	-	1 unit	-	**1 unit**	-	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional yang Diadakan	0		2 unit	60.000.000	1 unit	61.800.000	1 unit	63.654.000	2 unit	65.563.620	**2 unit**	65.563.620	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Diadakan	0		1 unit	30.000.000	1 unit	30.900.000	1 unit	31.827.000	1 unit	32.781.810	**1 unit**	32.781.810	**Kecamatan Candi**	

MATRIKS RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN CANDI
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2021-2026

Misi Bupati	Tujuan PD	Indikator Tujuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Sasaran PD	Indikator Sasaran	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (Tahun 2020)	Target					Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / kegiatan (intermediate output)/ subkegiatan (output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Ket
				2022	2023	2024	2025	2026				2022	2023	2024	2025	2026			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah (2026)			
1			4	5	6	7	8	9			12	13	14	15	16	17	18	19	21		22		23		24		25		26		27	28
																	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diadakan	0		1 unit	250.000.000	1 unit	257.500.000	1 unit	265.225.000	1 unit	273.181.750	**1 unit**	273.181.750	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Mebel	Jumlah Meubeleur yang Diadakan	0		5 unit	50.000.000	10 unit	51.500.000	15 unit	53.045.000	20 unit	54.636.350	**20 unit**	54.636.350	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung/ Kantor/ Rumah Dinas/ Jabatan yang Diadakan	0		3 unit	60.000.000	4 unit	61.800.000	5 unit	63.654.000	6 unit	65.563.620	**6 unit**	65.563.620	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Aset tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Diadakan	0		5 unit	50.000.000	10 unit	51.500.000	15 unit	53.045.000	20 unit	54.636.350	**20 unit**	54.636.350	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Diadakan	0		1 paket	50.000.000	1 paket	51.500.000	1 paket	53.045.000	1 paket	54.636.350	**1 paket**	54.636.350	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	0		1 paket	70.000.000	1 paket	72.100.000	1 paket	74.263.000	1 paket	76.490.890	**1 paket**	76.490.890	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Diadakan	0		1 paket	80.000.000	1 paket	82.400.000	1 paket	84.872.000	1 paket	87.418.160	**1 paket**	87.418.160	**Kecamatan Candi**	
																	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0		1 paket	75.000.000	1 paket	77.250.000	1 paket	79.567.500	1 paket	81.954.525	**1 paket**	81.954.525	**Kecamatan Candi**	
																	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Terpenuhinya Jasa Penunjang Perkantoran**	**90%**	**793.783.200**	**90%**	**842.596.696**	**95%**	**867.874.597**	**95%**	**893.910.835**	**100%**	**920.728.160**	**100%**	**920.728.160**	**Kecamatan Candi**	
																	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Keluar Masuk yang Dikelola	5.000 surat		5.000 surat	5.000.000	5.500 surat	5.150.000	5.500 surat	5.304.500	6.000 surat	5.463.635	6.000 surat	5.463.635	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening listrik, air, telepon dan internet yang terbayar	1 tahun	107.600.000	1 tahun	110.828.000	1 tahun	114.152.840	1 tahun	117.577.425	1 tahun	121.104.748	1 tahun	121.104.748	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Berfungsi Baik	0		50%	20.000.000	50%	20.600.000	75%	21.218.000	75%	21.854.540	75%	21.854.540	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Kebersihan Kantor yang Terbayar	a. 3 orang	686.183.200	a. 3 orang	706.768.696	a. 3 orang	727.971.757	a. 3 orang	749.810.910	a. 3 orang	772.305.237	a. 3 orang	772.305.237	Kecamatan Candi	
																		Jumlah Tenaga Keamanan Kantor yang Terbayar	b. 2 orang		b. 2 orang		b. 2 orang		b. 2 orang		b. 2 orang		b. 2 orang		Kecamatan Candi	
																		Jumlah Pengelola Keuangan dan Barang yang Terbayar	c. 10 orang		c. 10 orang		c. 10 orang		c. 10 orang		c. 10 orang		c. 10 orang		Kecamatan Candi	
																		Jumlah Tenaga Non ASN yang Terbayar	d. 14 orang		d. 14 orang		d. 14 orang		d. 14 orang		d. 14 orang		d. 14 orang		Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan**	**1 tahun**	**410.500.000**	**1 tahun**	**512.815.000**	**1 tahun**	**553.199.450**	**1 tahun**	**569.795.434**	**1 tahun**	**586.889.297**	**1 tahun**	**586.889.297**	**Kecamatan Candi**	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	a. Jumlah kendaraan jabatan yang dipelihara; b. Jumlah bahan peralatan dan bahan pembersih kendaraan yang tersedia c. Jumlah STNK kendaraan dinas yang lunas pajaknya	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	30.000.000	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	30.900.000	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	31.827.000	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	32.781.810	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	33.765.264	a. 2 unit R4 b.0 c. 2 unit R4	33.765.264	Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang Dipelihara	1 unit R3 3 unit R4	36.000.000	1 unit R3 3 unit R4	37.080.000	1 unit R3 3 unit R4	38.192.400	1 unit R3 3 unit R4	39.338.172	1 unit R3 3 unit R4	40.518.317	1 unit R3 3 unit R4	40.518.317	Kecamatan Candi	
																		Jumlah Bahan Peralatan dan Bahan Pembersih Kendaraan yang Tersedia	0		0		0		0		0		0		Kecamatan Candi	
																		Jumlah STNK Kendaraan Dinas yang Lunas Pajaknya	1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		1 R3 3 R4		Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara	0		-	-	1 unit	25.000.000	1 unit	25.750.000	1 unit	26.522.500	1 unit	26.522.500	Kecamatan Candi	
																		Jumlah Alat Besar yang Diurus Perijinannya	0		-		1 unit		1 unit		1 unit		1 unit		Kecamatan Candi	
																	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara	0		-	-	-	-	-	-	-	-	0%	-	Kecamatan Candi	
																		Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Diurus Perijinannya	0		-		-	-	-	-	-	-	0%	-	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeleur yang dipelihara	1 tahun	20.000.000	1 tahun	20.600.000	1 tahun	21.218.000	1 tahun	21.854.540		22.510.176	0%	22.510.176	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 tahun	79.000.000	1 tahun	81.370.000	1 tahun	83.811.100	1 tahun	86.325.433		88.915.196	0%	88.915.196	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0		1 unit	15.000.000	1 unit	15.450.000	1 unit	15.913.500	1 unit	16.390.905	1 unit	16.390.905	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	0		1 paket	25.000.000	1 paket	25.750.000	1 paket	26.522.500	1 paket	27.318.175	1 paket	27.318.175	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung/kantor /rumah dinas/jabatan yang dipelihara/rehabilitasi	400 m2	50.000.000	400 m2	51.500.000	400 m2	53.045.000	400 m2	54.636.350	400 m2	56.275.441	400 m2	56.275.441	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/rehabilitasi	8 unit	162.000.000	8 unit	166.860.000	8 unit	171.865.800	8 unit	177.021.774	8 unit	182.332.427	8 unit	182.332.427	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ rehabilitasi	2 unit	33.500.000	1 unit	34.505.000	1 unit	35.540.150	1 unit	36.606.355	1 unit	37.704.545	1 unit	37.704.545	Kecamatan Candi	
																	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Tanah	Jumlah Tanah yang Dipelihara/Rehabilitasi	0		1 unit	50.000.000	1 unit	51.500.000	1 unit	53.045.000	1 unit	54.636.350	1 unit	54.636.350	Kecamatan Candi	